



.....

.....

2025

LAPORAN

PERCEPATAN PELAKSANAAN

PROGRAM MBG

DI KABUPATEN PASURUAN

BAPPELITBANGDA
KABUPATEN
PASURUAN

PENGANTAR

.Puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen "Laporan Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pasuruan Tahun 2025" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai wujud respons cepat dan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung agenda prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, khususnya yang tertuang dalam Visi Asta Cita terkait pembangunan sumber daya manusia unggul. Kami meyakini bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program distribusi pangan semata, melainkan sebuah investasi peradaban jangka panjang untuk mencetak Generasi Emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Melalui kajian ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memetakan peta jalan (*roadmap*) kesiapan daerah secara holistik. Pembahasan dimulai dari penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, penguatan orkestrasi kelembagaan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas sektor, penataan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis klaster wilayah, hingga reformasi perizinan sanitasi (SLHS) demi menjamin standar keamanan pangan tertinggi.

Kami menyadari bahwa implementasi program berskala masif di wilayah dengan topografi yang kompleks seperti Kabupaten Pasuruan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dokumen ini juga menyajikan analisis risiko yang objektif serta rencana tindak lanjut yang diselaraskan sepenuhnya dengan direktif Badan Gizi Nasional. Prinsip kami adalah bekerja dengan kecepatan tinggi namun tetap dalam koridor kepatuhan regulasi (*compliance*) yang ketat.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Perangkat Daerah terkait, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam perumusan strategi ini. Sinergi *Pentahelix* yang telah terbangun menjadi modal sosial terbesar bagi Kabupaten Pasuruan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini adalah naskah hidup yang akan terus berkembang menyesuaikan dinamika kebijakan nasional. Oleh karena itu, kami

senantiasa membuka diri terhadap arahan, saran, dan penyempurnaan dari Pemerintah Pusat.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita semua dalam berikhtiar memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasuruan, 31 Desember 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.



DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang dan Urgensi Program	1
1.2.Dasar Hukum	3
1.3.Maksud dan Tujuan	5
1.4.Sasaran Program	6
1.5.Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	10
2.1.Posisi dan Peran Strategis Daerah	10
2.2.Potensi Sumber Daya Daerah.....	12
A.Topografi.....	12
B.Geologi dan Jenis Tanah	16
C.Klimatologi.....	22
D.Penggunaan Lahan	22
E.Potensi Pengembangan Wilayah	24
2.3.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	33
A.Daya Dukung Air	33
B.Daya Dukung Pangan	35
2.4.Ketahanan Energi	36
2.5.Lingkungan Hidup Berkualitas.....	38
2.6.Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim.....	41

2.7.Demografi.....	49
A.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	49
B.Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	51
C.Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan.....	54
D.Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan.....	59
E.Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan	61
F.Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut ..	63
G.Proyeksi Demografi.....	65
2.8.Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	70
A.Laju Pertumbuhan Ekonomi	70
B.Indeks/Rasio Gini	73
C.Angka Kemiskinan.....	74
D.Tingkat Pengangguran Terbuka	77
E.PDRB Perkapita	79
F.Indeks Pembangunan Manusia.....	80
BAB III KERANGKA STRATEGIS DAN PELAKSANAAN.....	84
3.1.Penyelarasan Visi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten	84
3.2.Integrasi Asta Cita Presiden dengan Misi Daerah	86
3.3.Matriks Penyelarasan Program Prioritas (Quickwin)	88
3.4.Kelembagaan dan Tata Kelola (Satgas).....	93
3.5.Infrastruktur Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	99
3.6.Analisis Detail Kapasitas Layanan dan Kelembagaan Pengelola	103
3.7.Standarisasi Higiene dan Sanitasi (SLHS).....	108
BAB IV KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT	111
4.1.Identifikasi Kendala dan Permasalahan	111
4.2.Rencana Tindak Lanjut	114



BAB V PENUTUP	117
5.1.Kesimpulan	117
5.2.Rekomendasi	118

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	10
2.2	Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya.....	15
2.3	Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	18
2.4	Iklim Kabupaten Pasuruan.....	22
2.5	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	23
2.6	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2024	52
2.7	Persebaran Penduduk Tahun 2020-2024.....	54
2.8	Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	56
2.9	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2021-2024.....	58
2.10	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	60
2.11	Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan	61
2.12	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	62
2.13	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	63
2.14	Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	64
2.15	Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	65
2.16	Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2030.....	67
2.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2030 ..	68
2.18	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2020-2024	79
2.19	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2017-2021 (SP2010).....	80
2.20	Perkembangan IPM dan Komponen IPM Tahun 2022-2024 (SP2020).....	81
3.1	Persandingan Visi Pusat, Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan	85
3.2	Persandingan Asta Cita Presiden dan Misi Bupati Pasuruan.....	88
3.3	Matriks Integrasi Asta Cita, Quick Wins, dan Program Prioritas Daerah	92
3.4	Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG	96
3.5	Rincian SPPG, Nama Yayasan dan Jumlah Penerima Manfaat	106

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan	12
2.2	Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian	14
2.3	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	23
2.4	Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan	32
2.5	Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029	34
2.6	Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	35
2.7	Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kab. Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	38
2.8	Kualitas Lahan dan Indeks LH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	39
2.9	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	45
2.10	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	47
2.11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2020-2024	49
2.12	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	50
2.13	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	52
2.14	Ekonomi Kab. Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	72
2.15	Indeks Gini Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024..	74
2.16	Kemiskinan Kab. Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .	76
2.17	TPT Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	78
2.18	IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ...	83
3.1	Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025	93
3.2	Bagan Sebaran Unit SPPG.....	100
3.3	Peta Sebaran SPPG	103
3.4	Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 500.16.7.2/1090/HK/424.013/2025 .	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Urgensi Program

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan imperatif strategis nasional yang menjadi pondasi utama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Komitmen ini termanifestasi secara konsisten dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Dalam arsitektur pembangunan tersebut, peningkatan derajat kesehatan dan perbaikan status gizi ditempatkan sebagai pilar fundamental, mengingat korelasi linear antara kecukupan gizi dengan perkembangan kognitif, pembentukan karakter, dan produktivitas manusia. Oleh karena itu, intervensi terhadap kerentanan pangan dan gizi khususnya pada anak sekolah, ibu hamil, dan balita menjadi agenda pembangunan yang mendesak untuk dieksekusi melalui pendekatan yang terpadu, holistik, dan berkelanjutan.

Sebagai terjemahan operasional dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia pada periode 2024-2025 menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Program Prioritas Strategis Nasional. Program ini didesain tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*), tetapi sebagai strategi akselerasi untuk mereduksi prevalensi *stunting*, mengatasi *hidden hunger* (kelaparan tersembunyi/kekurangan mikronutrien), serta memutus mata rantai kemiskinan struktural. Melalui penyediaan akses makanan sehat di satuan pendidikan, program MBG menargetkan penyelesaian masalah ketidakcukupan nutrisi harian yang selama ini menjadi faktor determinan rendahnya konsentrasi belajar dan tingginya angka absensi siswa akibat kerentanan terhadap penyakit infeksi.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan memiliki peran vital dan tanggung jawab besar dalam menyukseskan agenda strategis ini. Berdasarkan tinjauan demografis, Kabupaten Pasuruan menaungi populasi lebih dari 1,5 juta jiwa yang tersebar dalam struktur kewilayahan yang kompleks, meliputi 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa. Kondisi demografi yang besar ini menuntut

manajemen implementasi program yang presisi agar *coverage* layanan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran.

Urgensi pelaksanaan MBG di Kabupaten Pasuruan semakin relevan jika ditinjau dari kondisi epidemiologi gizi daerah. Mengacu pada Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), meskipun tren penurunan *stunting* menunjukkan arah positif, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan disparitas status gizi antarwilayah. Masih ditemukan kantong-kantong prevalensi gizi kurang dan anemia pada remaja putri di beberapa kecamatan. Temuan ini diperkuat oleh evaluasi internal Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang mengonfirmasi adanya hubungan kausalitas antara defisit asupan gizi dengan penurunan performa akademis peserta didik. Realitas ini menegaskan bahwa MBG di Kabupaten Pasuruan adalah investasi mutlak untuk menyelamatkan masa depan generasi daerah.

Tantangan implementasi program di Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari karakteristik geografis wilayah seluas 1.474,02 km² yang sangat variatif, membentang dari kawasan pesisir (seperti Kecamatan Lekok dan Nguling), dataran rendah, hingga kawasan pegunungan (seperti Kecamatan Tosari dan Puspo). Keragaman topografi ini menghadirkan tantangan logistik tersendiri dalam distribusi makanan yang tepat waktu dan higienis. Namun, di sisi lain, posisi Kabupaten Pasuruan yang berada pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" LS dan 112°34'29.31" - 113°6'0.29" BT memberikan keuntungan geostrategis.

Kabupaten Pasuruan terletak di simpul "Segitiga Emas" jalur ekonomi Jawa Timur yang menghubungkan koridor Surabaya, Malang, dan Jember/Banyuwangi. Keunggulan ini diperkuat dengan dukungan infrastruktur konektivitas yang masif, termasuk jaringan jalan tol terintegrasi (Porong-Gempol, Gempol-Pandaan, Pandaan-Malang, Gempol-Pasuruan, hingga Pasuruan-Probolinggo) serta jalur kereta api ganda. Modalitas infrastruktur ini menjadi *enabler* utama dalam memperlancar rantai pasok (*supply chain*) bahan pangan. Hal ini sangat krusial mengingat Program MBG mengusung pendekatan *local food-based* (berbasis pangan lokal). Dengan konektivitas yang prima, mobilisasi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan lokal seperti sayur mayur dari dataran tinggi, ikan dari pesisir, dan produk olahan UMKM dapat didistribusikan secara efisien ke dapur-dapur penyediaan makanan.

Dengan demikian, Program MBG di Kabupaten Pasuruan diproyeksikan memberikan *multiplier effect* ganda. Pertama, sebagai intervensi kesehatan untuk mencetak generasi cerdas dan sehat. Kedua, sebagai stimulus ekonomi kerakyatan yang menyerap produk lokal dan memberdayakan UMKM. Untuk memastikan program yang kompleks ini berjalan efektif di tengah tantangan kapasitas sekolah dan kebutuhan edukasi perubahan perilaku konsumsi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengedepankan sinergi lintas sektor (Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Bappelitbangda, Ketahanan Pangan) serta pelibatan aktif elemen masyarakat.

Laporan Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen teknokratik yang berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, monitoring, dan evaluasi. Dokumen ini merekam secara komprehensif dinamika lapangan, mulai dari realisasi distribusi, kepatuhan standar gizi, hingga analisis kendala dan solusi yang ditempuh. Laporan ini diharapkan menjadi landasan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang, demi terwujudnya visi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi Indonesia Emas 2045.

1.2. Dasar Hukum

Landasan yuridis yang memayungi pelaksanaan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan disusun secara hierarkis, mulai dari konstitusi negara, undang-undang sektoral, peraturan pemerintah pusat, hingga keputusan kepala daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;
7. Keputusan Bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 125 Tahun 2025, Nomor: 17/PKS/M/2025, Nomor: 400.5.7-3880 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
10. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pelayanan Gizi Badan Gizi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pasuruan;
14. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 500.16.7.2/1090/HK/424.013/2025 tentang Pejabat Penandatanganan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pasuruan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai manifestasi tertulis dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendokumentasikan seluruh rangkaian proses kebijakan, mulai dari tahap perencanaan strategis, konsolidasi kelembagaan, hingga eksekusi teknis di lapangan. Laporan ini hadir untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan faktual mengenai dinamika implementasi program prioritas nasional di tingkat daerah, khususnya dalam merespons tantangan geografis dan demografis yang unik di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi instrumen rekam jejak (*tracking record*) kinerja Satuan Tugas (Satgas) dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menerjemahkan regulasi pusat menjadi aksi nyata di daerah. Hal ini mencakup pendokumentasian proses pembangunan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar keamanan pangan melalui Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta mekanisme distribusi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai naskah akademik dan teknokratik yang merekam sejarah awal transformasi perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Pasuruan pada tahun anggaran 2025.

Tujuan utama dari penyusunan laporan ini dirumuskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Mengukur Capaian Kinerja dan Efektivitas Program Untuk melakukan evaluasi yang objektif terhadap realisasi pelaksanaan program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini meliputi pengukuran tingkat partisipasi penerima manfaat (peserta didik, ibu hamil, dan balita), ketepatan waktu distribusi, serta cakupan wilayah layanan operasional Dapur SPPG. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi sasaran.
2. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif Pemerintah Kabupaten Pasuruan

kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Laporan ini bertujuan menjabarkan secara transparan bagaimana kewenangan daerah dijalankan, bagaimana sumber daya dioptimalkan, dan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) diterapkan dalam mengawal program strategis yang berskala masif ini, sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.

3. Memetakan Isu Strategis, Kendala, dan Tantangan Untuk mengidentifikasi secara dini berbagai hambatan teknis maupun non-teknis yang muncul selama proses implementasi di lapangan. Hal ini mencakup analisis terhadap kendala rantai pasok (*supply chain*) bahan pangan lokal, tantangan infrastruktur di wilayah pegunungan atau pesisir, serta dinamika sosial dalam adaptasi pola konsumsi masyarakat. Pemetaan ini krusial untuk menemukan "leher botol" (*bottleneck*) yang menghambat kelancaran program.
4. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) Menyusun rumusan langkah-langkah perbaikan yang konstruktif dan solutif untuk periode pelaksanaan berikutnya. Berdasarkan data dan fakta yang tersaji, laporan ini bertujuan memberikan masukan strategis bagi pengambil keputusan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat dalam menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP), memperkuat regulasi pendukung, serta meningkatkan efisiensi mekanisme kerja Satgas MBG di masa mendatang.

1.4. Sasaran Program

Penetapan sasaran dalam percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dirumuskan secara holistik guna memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan yang diambil memiliki dampak terukur terhadap peningkatan kualitas modal manusia dan ekonomi daerah. Sasaran program ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi strategis, yaitu sasaran penerima manfaat langsung, sasaran pembangunan infrastruktur pelayanan, serta sasaran penguatan kelembagaan dan regulasi.

Sebagai sasaran utama, Sasaran Penerima Manfaat (*Beneficiaries*) dari program ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki urgensi tinggi terhadap kebutuhan intervensi gizi, yang merupakan investasi jangka panjang bagi

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pasuruan. Lingkup sasaran penerima manfaat meliputi:

1. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan: Mencakup siswa-siswi yang terdaftar aktif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta. Fokus sasaran ini bertujuan untuk menjamin asupan energi dan protein harian yang cukup guna mendukung konsentrasi belajar dan perkembangan kognitif di sekolah.
2. Kelompok Ibu Hamil dan Ibu Menyusui: Ditargetkan sebagai upaya preventif sejak dini (hulu) untuk mencegah terjadinya stunting dan kekurangan gizi pada bayi baru lahir, sekaligus memastikan kesehatan ibu selama masa kehamilan dan laktasi.
3. Balita dan Anak Usia Dini: Menyasar anak-anak pada fase golden age pertumbuhan untuk memastikan tumbuh kembang fisik dan otak yang optimal serta bebas dari ancaman gizi buruk. (Catatan: Detail kuantitatif jumlah sasaran penerima manfaat akan disajikan lebih lanjut pada Bab IV berdasarkan basis data terbaru).

Pada Sasaran Fisik dan Infrastruktur (*Infrastructure Targets*) difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang representatif, higienis, dan strategis. Berdasarkan Keputusan Bersama Tingkat Pusat, sasaran prioritas pembangunan SPPG di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ditetapkan pada lokasi-lokasi yang memiliki daya dukung lahan dan aksesibilitas memadai, yaitu:

1. Wilayah Kecamatan Grati: Pembangunan unit layanan difokuskan di Kelurahan Gratitunon, yang diproyeksikan melayani kebutuhan distribusi untuk wilayah pasuruan bagian timur.
2. Wilayah Kecamatan Gondang Wetan: Pembangunan unit layanan bertempat di Lapangan Gayam, yang memiliki posisi strategis untuk menjangkau kluster sekolah dan pemukiman di wilayah tengah.

3. Wilayah Kecamatan Bangil: Pembangunan unit layanan berlokasi di Kelurahan Gempeng, sebagai pusat pelayanan untuk wilayah ibu kota kabupaten dan sekitarnya yang memiliki densitas sasaran tinggi.

Sasaran Kelembagaan dan Regulasi (*Institutional Targets*) berorientasi pada terciptanya ekosistem tata kelola program yang akuntabel, legal, dan profesional melalui:

1. Penguatan Struktur Satuan Tugas (Satgas): Terbentuk dan berfungsinya Satgas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pasuruan secara efektif di bawah payung hukum Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025. Sasaran ini mencakup optimalisasi peran koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam mengatasi kendala operasional di lapangan.
2. Standarisasi Keamanan Pangan (*Food Safety*): Terjaminnya mutu dan keamanan makanan yang didistribusikan melalui kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh unit dapur penyedia (SPPG). Hal ini diperkuat dengan penetapan Pejabat Penandatangan SLHS melalui Keputusan Bupati Nomor 500.16.7.2/1090/HK/424.013/2025, yang menjamin bahwa setiap sajian makanan telah melalui proses verifikasi sanitasi yang ketat.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan alur pembahasan yang sistematis, logis, dan mudah dipahami, Kajian Kesiapan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN** Menguraikan latar belakang urgensi program, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, ruang lingkup kajian, metode pendekatan yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.
- **BAB II: LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS** Menyajikan kerangka pemikiran teoritis mengenai investasi modal manusia (*human capital*) serta inventarisasi landasan hukum yang menjadi payung regulasi pelaksanaan program, mulai dari tingkat Pusat hingga Keputusan Bupati Pasuruan.

- **BAB III: KERANGKA STRATEGIS DAN PELAKSANAAN** Membahas integrasi visi Asta Cita dengan program prioritas daerah, orkestrasi kelembagaan melalui pembentukan Satgas lintas sektor, strategi infrastruktur layanan (SPPG) berbasis klaster wilayah, serta reformasi sistem penjaminan mutu dan sanitasi (SLHS).
- **BAB IV: KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT** Memetakan identifikasi kendala operasional (geografis, rantai pasok, dan SDM) serta merumuskan rencana tindak lanjut yang diselaraskan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional sebagai langkah mitigasi risiko.
- **BAB V: PENUTUP** Berisi kesimpulan menyeluruh atas status kesiapan daerah serta rekomendasi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06

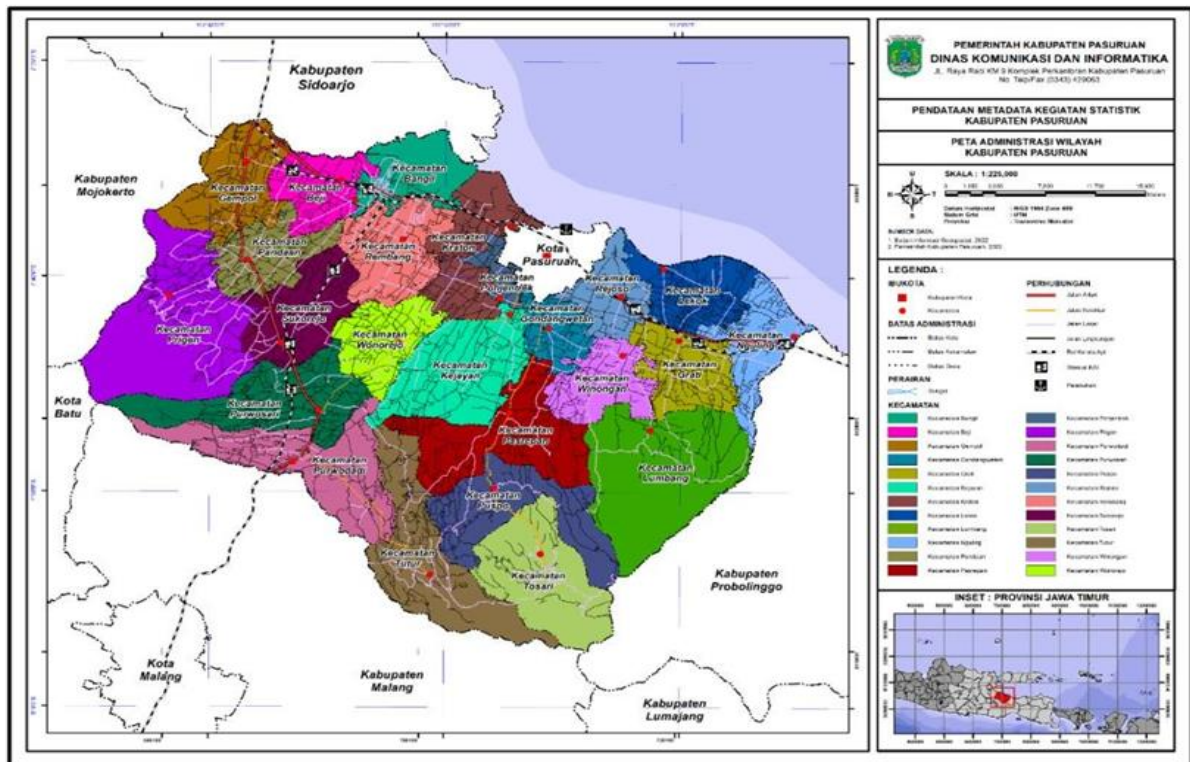
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun

visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Potensi Sumber Daya Daerah

A. Topografi

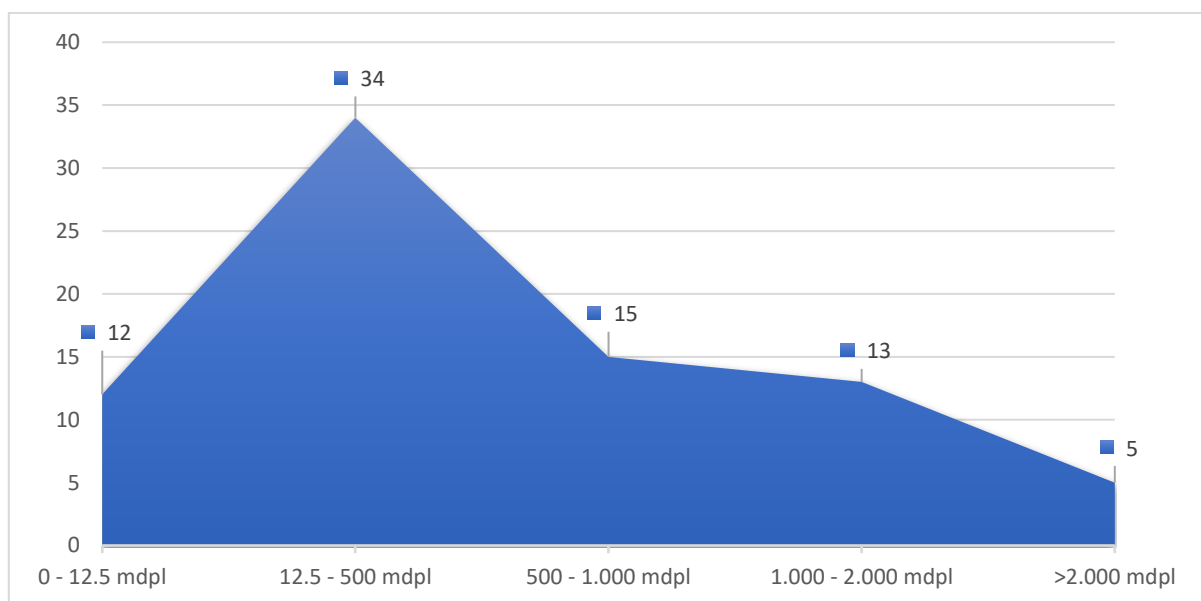
Secara topografis, bentang alam wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi elevasi yang sangat beragam, terentang mulai dari titik terendah di 0 mdpl hingga mencapai puncak tertinggi di 3.313 meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ketinggian ini tercatat secara rinci di setiap wilayah administrasi kecamatan. Karakteristik wilayah ini terbagi secara jelas berdasarkan letak geografisnya; dataran rendah mendominasi kawasan bagian utara, khususnya di sepanjang garis Pesisir Selat Madura, dengan rentang ketinggian antara 0 hingga 290 mdpl. Konsekuensi dari kondisi topografi yang rendah ini menyebabkan kawasan tersebut diidentifikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ancaman bencana banjir.

Sebaliknya, kontur dataran tinggi terpusat pada bagian tenggara yang merupakan bagian dari Kawasan Gunung Bromo, serta di bagian barat daya yang meliputi Kawasan Gunung Welirang. Morfologi kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar ditandai dengan kondisi kelerengan yang terjal atau curam, yang secara alamiah membawa implikasi risiko berupa potensi bencana tanah longsor.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kemiringan lahan atau kelerengan, wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tujuh (7) kategori zona, yaitu sebagai berikut:

1. Zona Kelerengan 0 - 2% (Datar): Wilayah ini meliputi cakupan yang luas, antara lain mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Lekok. Selain itu, zona ini juga mencakup sebagian wilayah dari Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, serta Kecamatan Nguling.
2. Zona Kelerengan 2 - 5% (Landai): Kategori ini tersebar meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.
3. Zona Kelerengan 5 - 8% (Agak Miring): Kawasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Lekok.
4. Zona Kelerengan 8 - 15% (Miring): Wilayah dengan kemiringan ini mencakup sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan, serta Kecamatan Grati.

5. Zona Kelerengan 15 - 25% (Agak Curam): Daerah yang memiliki tingkat kemiringan ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Beji.
6. Zona Kelerengan 25 - 45% (Curam): Kawasan dengan topografi curam ini terdapat pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
7. Zona Kelerengan > 45% (Sangat Curam): Zona dengan kemiringan ekstrem ini meliputi sebagian wilayah di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Prigen.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar tersebut, kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis dan bervariasi apabila ditinjau dari aspek ketinggian lahan atau elevasi. Keragaman bentang alam ini menjadi dasar fundamental dalam pemetaan karakteristik geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada perbedaan elevasi yang ada, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan secara spesifik ke

dalam 5 (lima) kategori atau jenis wilayah. Rincian sistematis mengenai kelima klasifikasi wilayah tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819,04	Kawasan pengembangan usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah Dataran	12,5 - 500	50.384,02	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 - 1.000	21.877,17	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
				air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring	Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000 - 2.000	18.615,08	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan Pegunungan Tinggi	>2.000	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

B. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, karakteristik litologi wilayah bagian selatan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari bentang alam Pegunungan Malang Selatan yang secara dominan tersusun oleh struktur batuan vulkanik. Pembentukan formasi

batuan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme gunung berapi yang terjadi pada masa lampau (paleovolcanism). Material penyusun kawasan ini mencakup variasi jenis batuan beku dan piroklastik, seperti andesit, basalt, serta batuan piroklastik lainnya. Keberadaan gunung-gunung api strato yang menjulang tinggi, khususnya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, menjadi bukti nyata sekaligus sumber material utama dari deposit batuan vulkanik yang tersebar luas di wilayah selatan ini.

Sementara itu, pada sisi bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan, kondisi geologinya didominasi oleh hamparan batuan sedimen. Jenis batuan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang kompleks, meliputi endapan sungai (fluvial), bentukan delta, hingga sedimen laut (marine sediment). Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh dinamika geologis seperti mekanisme pengendapan material, sedimentasi berkelanjutan, serta aktivitas tektonik. Jaringan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan berperan vital dalam transportasi material endapan yang tererosi dari kawasan pegunungan dan perbukitan di sekitarnya menuju ke dataran yang lebih rendah. Akibat proses ini, pada kawasan dataran rendah terbentuk lapisan endapan alluvial yang sangat subur dan kaya akan kandungan bahan organik, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi kesuburan tanah untuk mendukung sektor pertanian yang makmur di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, posisi geografis Wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam zona yang tergolong aktif secara tektonik. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalur-jalur patahan (sesar) dan rekahan geologi yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Aktivitas tektonik yang berlangsung dalam kurun waktu geologis tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konfigurasi relief permukaan bumi serta pola aliran sungai (drainase) yang ada saat ini. Di samping itu, beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan juga teridentifikasi memiliki kandungan deposit batu gamping (batu kapur). Batuan ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi laut purba dan kini menjadi salah satu sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis tinggi, khususnya sebagai bahan baku utama untuk mendukung industri konstruksi dan bahan bangunan.

Ditinjau dari perspektif struktur geologi secara makro, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi secara proporsional ke dalam dua kelompok formasi geologi besar. Kelompok pertama adalah formasi gunung api kuartir muda (young quaternary) yang

mendominasi wilayah dengan cakupan luasan mencapai 52,43%, sedangkan kelompok kedua adalah formasi kuartar tua (old quaternary) yang mencakup luasan sebesar 34,95%. Secara lebih spesifik, kondisi geologi wilayah ini tersusun atas dua belas (12) satuan batuan yang meliputi: Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartar atas Penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api Arjuno-Welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartar tengah Ringgit (Qvr), serta Satuan gunung api kuartar Tengger tua (Qpvtr).

Secara garis besar, klasifikasi jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: kelompok batuan permukaan, kelompok batuan sedimen, dan kelompok batuan gunung api. Rincian penjelasan teknis mengenai karakteristik masing-masing jenis batuan tersebut telah disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 2.3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur 2. Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan 2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
	2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	1. Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	1. Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna - Welirang	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari tuf pasir, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	1. Terdiri dari tuf pasir, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
Batuan Gunung Api Bromo	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar 2. Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung 2. Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kompleksitas proses geologi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang di wilayah Kabupaten Pasuruan telah meninggalkan jejak yang signifikan. Fenomena ini membentuk banyak rekaman peristiwa geologi yang unik dan menarik, yang memiliki nilai ilmiah serta estetika tinggi. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola dan ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geological Heritage). Langkah pelestarian

ini menjadi sangat krusial agar keberadaan situs-situs geologi tersebut tetap terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan, sekaligus mendorong pengakuan status Warisan Geologi tersebut tidak hanya pada tingkat Nasional, tetapi juga menembus pengakuan di tingkat Internasional.

Lebih lanjut, beralih pada aspek pedologi atau karakteristik tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki variasi jenis tanah yang cukup beragam. Berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya, jenis tanah di wilayah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok utama. Identifikasi ini penting untuk menentukan daya dukung lahan terhadap berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian. Berikut adalah rincian keenam kelompok tanah tersebut:

1. Tanah Alluvial Jenis tanah ini memiliki karakteristik fisik berupa warna dominan kelabu dengan tekstur liat. Tingkat keasaman tanah ini bervariasi (aneka), namun memiliki kandungan zat organik yang tergolong lemah. Meskipun demikian, tingkat kejenuhan biasanya berkisar antara sedang hingga tinggi. Dari sisi hidrologi, tanah Alluvial memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun kepekaan terhadap erosi tergolong tinggi, namun karena sebarannya mayoritas berada di daerah yang datar, risiko erosi lanjut tidak terjadi secara signifikan. Pemanfaatan: Lahan dengan jenis tanah ini sangat cocok dan umum digunakan untuk budidaya padi sawah, tanaman palawija, serta kegiatan perikanan darat.
2. Tanah Regosol Tanah Regosol dicirikan dengan warna yang bervariasi dari kelabu hingga kuning dengan tekstur yang kasar atau berpasir. Kandungan liat pada tanah ini relatif sedikit, yakni kurang dari 40%. Sifat kimianya menunjukkan keasaman dan kejenuhan basa yang beraneka ragam, serta kandungan zat organik yang rendah. Tanah ini memiliki permeabilitas atau kemampuan meloloskan air yang tinggi, serta memiliki kepekaan yang tinggi pula terhadap erosi. Pemanfaatan: Jenis tanah ini mendukung untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, tanaman palawija, perkebunan tebu, serta budidaya berbagai jenis sayuran.
3. Tanah Andosol Tanah yang umumnya terbentuk dari material vulkanik ini memiliki ciri khas warna hitam hingga kuning. Teksturnya berkisar dari lempung hingga debu, dengan kandungan liat yang cenderung menurun. Derajat

keasamannya berada pada rentang agak masam hingga netral, dengan kandungan zat organik yang lemah dan kejenuhan basa. Sifat fisiknya memiliki permeabilitas sedang, namun perlu diwaspadai karena memiliki kepekaan yang besar terhadap ancaman erosi. Pemanfaatan: Lahan Andosol sangat produktif untuk komoditas dataran tinggi seperti sayur-mayur, tanaman bunga-bunga, perkebunan teh, kopi, serta pengembangan hutan pinus.

4. Tanah Grumusol Karakteristik fisik tanah Grumusol ditandai dengan warna kelabu hingga hitam pekat. Tekstur tanah ini didominasi oleh liat, di mana kandungan liatnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman tanah. Secara kimiawi, tanah ini memiliki reaksi sedikit asam hingga alkalin (basa), dengan kadar zat organik yang rendah namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Permeabilitas tanah ini rendah, yang menyebabkan air sulit meresap, dan memiliki kepekaan erosi yang besar. Pemanfaatan: Tanah ini dimanfaatkan secara luas untuk pertanian padi sawah, tanaman jagung, kedelai, tebu, kapas, serta sangat cocok untuk pertumbuhan hutan jati.
5. Tanah Mediteran Tanah Mediteran mudah dikenali dari warnanya yang kuning hingga merah. Tekstur tanah ini adalah lempung liat dengan tingkat keasaman mulai dari agak masam hingga netral. Kandungan zat organik di dalamnya tergolong rendah, namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Sifat permeabilitasnya sedang, sementara kepekaan terhadap erosi berkisar dari besar hingga sedang, tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan: Potensi lahan ini umumnya digunakan untuk areal persawahan (padi sawah), lahan tegalan, serta area pertumbuhan rumput untuk pakan ternak.
6. Tanah Latosol Jenis tanah ini memiliki warna khas merah hingga kuning dengan tekstur liat yang konsisten dari lapisan atas hingga ke bawah. Tingkat keasamannya berkisar dari masam hingga agak masam. Kandungan zat organiknya bervariasi dari rendah hingga agak sedang di lapisan permukaan (top soil) dan menurun pada lapisan yang lebih dalam. Kejenuhan basanya rendah hingga sedang, namun memiliki permeabilitas yang tinggi dan keunggulan berupa kepekaan erosi yang kecil, sehingga relatif stabil. Pemanfaatan: Tanah Latosol sangat mendukung berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, meliputi padi sawah, jagung, tanaman umbi-

umbian, kelapa, coklat (kakao), cengkeh, kopi, maupun sebagai area hutan tropika.

C. Klimatologi

Secara klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum dikategorikan memiliki tipe iklim tropis basah. Kondisi cuaca dan iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi udara regional, khususnya hembusan angin Muson yang bertiup secara periodik. Keberadaan angin Muson ini memegang peranan vital dalam membentuk pola iklim wilayah serta menentukan siklus pergantian musim. Fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme musim, yakni musim penghujan yang ditandai dengan aktivitas angin Muson Timur, serta musim kemarau yang terjadi akibat pengaruh hembusan angin Muson Barat. Adapun gambaran spesifik mengenai data dan kondisi iklim aktual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sepanjang Tahun 2024, disajikan secara terperinci dalam Tabel berikut.

Tabel 2.4 Iklim Kabupaten Pasuruan

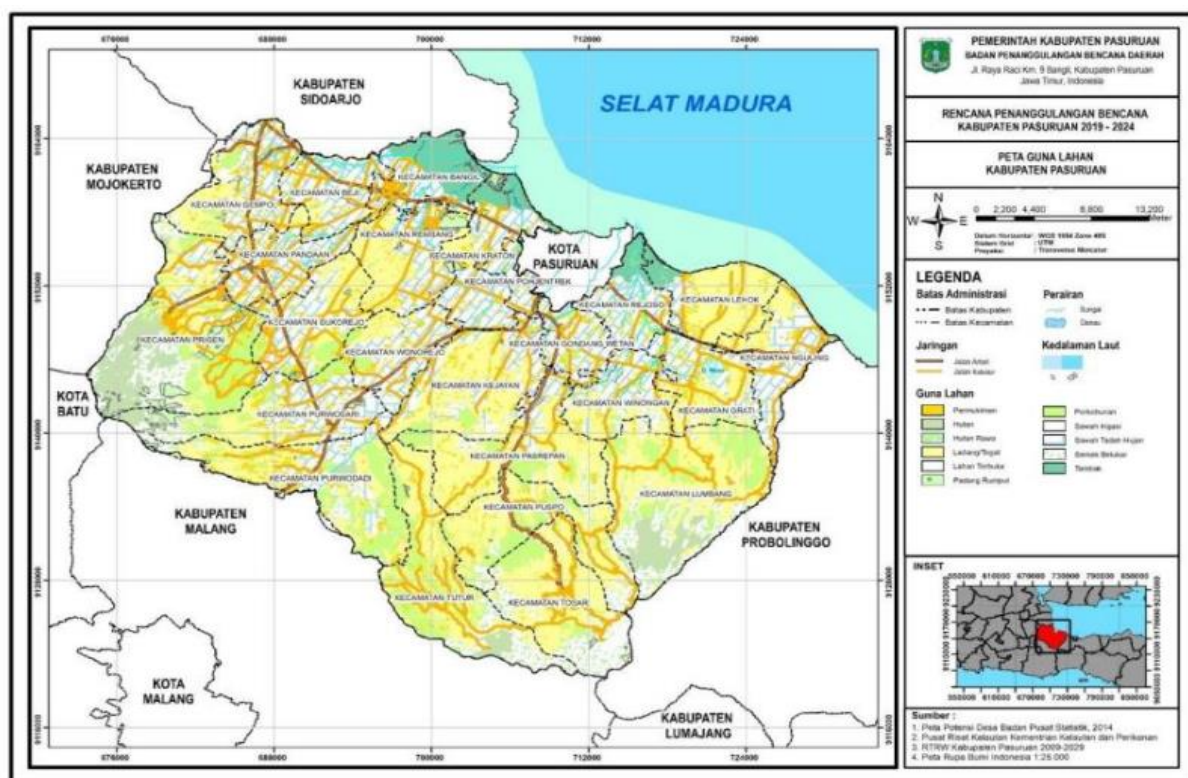
Kecepatan Angin	Maks 13 Knots terjadi di bulan Maret dan April
Rata-rata Kelembapan Maksimum	91% di bulan Februari dan Desember
Hari Hujan	Terbanyak selama 25 hari di bulan Maret dan Desember
Rata-rata Penyinaran Matahari	Paling lama 6,3 jam di bulan Agustus
Curah Hujan	Maks 736,1 mm/tahun terjadi di bulan Desember
Rata-rata Suhu Tertinggi	Mencapai 24,5 C terjadi di bulan Oktober

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari aspek tata guna lahan, pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dominasi yang signifikan pada sektor pertanian. Hal ini

terindikasi dari penggunaan lahan terbesar yang dialokasikan untuk areal persawahan dengan sistem irigasi, yang mencatatkan total luasan mencapai 38.391,34 Hektar. Di sisi lain, proporsi lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun yang meliputi permukiman, kawasan industri, dan fasilitas infrastruktur lainnya tercatat seluas 17.301,60 Hektar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan komposisi peruntukan lahan lainnya, rincian data secara mendetail telah diuraikan dalam Tabel berikut:



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Presentase
1	Aneka Industri	0,994
2	Industri Kecil	0,023
3	Jasa Permukiman	10,169
4	Peternakan Unggas	0,021
5	Tambak	1,696
6	Sawah Irigasi	26,187
7	Sawah Tadah Hujan	1,536
8	Buah-Buahan	0,006

No	Penggunaan	Presentase
9	Kebun Campuran	3,242
10	Perkebunan	2,805
11	Tegalan/Ladang	36,051
12	Hutan Sejenis	11,878
13	Padang Rumput	0,707
14	Semak	2,708
15	Kolam Air Tawar	0,001
16	Lapangan Olahraga	0,215
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033
18	Tanah Terbuka	1,224
19	Sungai	0,217
20	Danau/Situ/Telaga	0,127
21	Jalan Aspal	0,081
22	Pemakaman	0,081

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan, 2024

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara ekonomis, Kabupaten Pasuruan dianugerahi berbagai keunggulan komparatif maupun kompetitif yang menjadi potensi daerah yang sangat strategis. Apabila seluruh potensi tersebut dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan manajemen yang tepat, maka hal tersebut akan menjadi katalisator utama dalam mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah secara signifikan. Salah satu pilar utama yang menjadi keunggulan tersebut adalah:

1. Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi, yang telah menghubungkan hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pasuruan, menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah. Aksesibilitas yang tinggi ini memberikan dukungan yang sangat vital bagi akselerasi perkembangan di berbagai sektor strategis, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan destinasi pariwisata, produktivitas pertanian, kemajuan sektor industri, serta kelancaran transportasi. Lebih jauh lagi, konektivitas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas.

Selain mengandalkan prasarana jalan raya, sistem transportasi logistik barang dan mobilitas jasa juga diperkuat dengan dukungan moda transportasi berbasis rel. Jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi sarana pendukung yang efisien, dengan melayani dua koridor utama yang strategis, yakni jurusan selatan (Surabaya - Bangil - Malang - Blitar) dan jurusan timur (Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi).

Sebagai daerah yang memiliki basis perekonomian kuat pada sektor pertanian dan industri, Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan sistem jaringan irigasi teknis yang handal. Infrastruktur ini berfungsi krusial dalam mendukung produktivitas lahan pertanian serta kebutuhan air baku bagi kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang tersedia dirancang untuk mampu mengairi lahan pertanian secara memadai, yang pengelolaannya dioptimalkan melalui mekanisme pengelolaan irigasi partisipatif guna menjamin keberlanjutan pasokan air.

Sementara itu, dari sisi pengembangan investasi, ketersediaan Kawasan Industri yang terpadu menjadi nilai tambah tersendiri. Kawasan ini telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang komprehensif, termasuk fasilitas pengelolaan limbah yang berstandar serta fasilitas penunjang lainnya. Keunggulan kawasan ini semakin nyata dengan adanya konektivitas langsung (aksesibilitas) menuju jaringan jalan tol yang menghubungkan arah Surabaya - Malang hingga Banyuwangi/Bali, yang menjamin efisiensi logistik.

Tidak hanya itu, ketersediaan komponen infrastruktur utilitas dasar lainnya juga telah terpenuhi dalam jumlah yang cukup memadai, meliputi ketersediaan air bersih, suplai energi listrik yang stabil, jaringan pipa gas untuk industri, serta infrastruktur telekomunikasi yang modern. Dengan demikian, ekosistem infrastruktur yang telah terbangun secara menyeluruh ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menunjang perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan."

2. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan menyimpan kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam dan bernilai tinggi, mencakup berbagai spektrum mulai dari keindahan alam, kekayaan sejarah, hingga inovasi wisata buatan dan agrowisata. Salah satu daya tarik utama yang menjadi primadona dan telah

diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo. Destinasi ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menawarkan panorama matahari terbit yang ikonik serta pemandangan kaldera yang spektakuler.

Selain pesona Bromo, Kabupaten Pasuruan juga dianugerahi berbagai wisata alam lainnya yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Wisata berbasis perairan dan air terjun menjadi unggulan, meliputi Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru yang legendaris, keindahan Danau Ranu Grati, serta kejernihan Sumber Air Umbulan. Deretan air terjun eksotis lainnya yang patut dikunjungi antara lain Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, hingga Air Terjun Coban Waru. Tidak hanya di dataran tinggi, potensi wisata bahari dan pesisir juga tersedia, seperti Pantai Pasir Panjang di Kecamatan Lekok, serta ekosistem Hutan Mangrove yang asri di Pantai Penunggul (Kecamatan Nguling), Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Kraton.

Dari aspek sejarah dan spiritualitas, Kabupaten Pasuruan kaya akan situs wisata budaya dan religi yang menjadi saksi perjalanan peradaban masa lampau. Peninggalan masa klasik Hindu-Buddha dapat ditemukan pada situs Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, serta situs Dewa Wisata Purbakala Tambak Sari. Jejak sejarah perjuangan juga terekam di Goa Jepang/Inna Tretes. Sementara itu, wisata religi Islam atau ziarah makam leluhur meliputi Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, dan Makam Mbah Segoropuro. Bagi para pencari ketenangan spiritual, terdapat pula lokasi pertapaan seperti Pertapaan Abiyoso dan Pertapaan Indrokilo.

Melengkapi keindahan alam dan budaya, sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan Wisata Buatan yang menawarkan alternatif rekreasi modern dan pengalaman baru bagi wisatawan keluarga. Beberapa destinasi unggulan dalam kategori ini antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park.

Sektor pertanian yang subur di Kabupaten Pasuruan juga diintegrasikan menjadi daya tarik Wisata Agro yang edukatif dan rekreatif. Destinasi ini tersebar luas, meliputi Agrowisata Apel, Agro Kopi, serta Agro Bunga Krisan dan Paprika yang terpusat di Kecamatan Tutar. Selain itu, terdapat pula sentra Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutar dan Kecamatan Grati, budidaya Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, serta sentra Agro Durian yang dapat ditemui di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tutar, dan Puspo. Destinasi agrowisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi meliputi Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutar, wisata sejarah industri Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, perkebunan Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Sukorejo, wisata edukasi Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, serta hamparan harum Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Terakhir, Kabupaten Pasuruan juga memfasilitasi segmen Wisata Minat Khusus yang menawarkan pengalaman eksklusif dan petualangan. Destinasi yang masuk dalam kategori ini antara lain Taman Safari Indonesia II yang terkenal sebagai konservasi satwa, kawasan elit Taman Dayu, fasilitas olahraga golf di Finna Golf & Country Club, kawasan wisata Kaliandra, Bukit Flora, serta area berkemah di Baung Camp. Pengembangan pariwisata ini juga diperkuat dengan keberadaan Desa Wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-desa wisata ini tersebar strategis di berbagai kecamatan, yaitu di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutar, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Winongan.

3. Potensi Industri

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Pasuruan, dengan spektrum yang luas meliputi industri skala besar, menengah, hingga industri kecil. Persebaran industri besar terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis yang didukung oleh aksesibilitas yang baik, yakni meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Kejayan. Sementara itu, industri kecil dan menengah (IKM) tumbuh

subur dan menjadi penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Sektor IKM ini bergerak dalam berbagai bidang yang variatif, antara lain industri makanan dan minuman, kerajinan bordir, tekstil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), konveksi, meubel kayu, serta kerajinan logam.

Dalam peta industri kreatif daerah, salah satu sektor unggulan yang telah memiliki reputasi kuat adalah kerajinan bordir, konveksi, dan batik. Kecamatan Bangil telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan bordir dengan keunggulan kompetitif pada desain yang inovatif dan kualitas yang prima. Tingginya permintaan pasar yang sering kali melebihi kapasitas produksi di Bangil memicu terbentuknya jejaring produksi yang meluas ke kecamatan penyangga lainnya, seperti Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, dan Winongan. Jangkauan pemasaran produk bordir ini tidak hanya mendominasi pasar lokal, tetapi juga sukses menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, hingga kawasan Timur Tengah. Di sektor lain, industri konveksi berkembang pesat di Kecamatan Gempol dengan spesialisasi produk berupa celana jeans, kaos, dan celana olahraga (sport). Tidak ketinggalan, industri batik pewarna alam juga menunjukkan eksistensinya yang semakin diakui oleh konsumen mancanegara, dengan pasar ekspor mencakup Korea, Malaysia, dan Australia.

Potensi sumber daya alam juga mendorong berkembangnya sentra industri kayu dan meubel. Sentra-sentra ini tersebar di berbagai titik, antara lain di Desa Sentul (Kecamatan Purwodadi), Desa Tambaksari (Kecamatan Kraton), Desa Wonorejo (Kecamatan Wonorejo), Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan (Kecamatan Pohjentrek), serta wilayah Kecamatan Winongan dan Rejos. Para pengrajin di wilayah ini sangat kreatif dalam menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, mulai dari mainan edukatif anak-anak, aksesoris otomotif (setir mobil, handle persneling, dashboard), kotak tisu, papan catur, hingga produk furnitur atau meubel. Pemasaran produk berbasis kayu ini telah menjangkau pasar domestik hingga internasional.

Selain kayu, Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra kerajinan logam mulia, khususnya perak, yang berpusat di Kecamatan Bangil dan Gempol. Karya pengrajin perak ini telah berhasil menembus pasar global, termasuk ekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Di sisi lain, industri

pendukung otomotif berupa industri kecil spare part kendaraan bermotor tumbuh berkembang di Kecamatan Winongan, dengan distribusi pasar utama menyuplai kebutuhan di kota besar seperti Malang dan Surabaya.

Untuk mendukung iklim investasi, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri terpadu, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Sebagai kawasan berikat, PIER menawarkan lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan menjanjikan bagi para investor. Selain PIER, pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan kawasan peruntukan industri di luar area tersebut yang membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan industri baru di masa depan.

Sektor industri kecil makanan dan minuman (mamin) yang berbasis bahan baku lokal juga menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat di seluruh kecamatan. Salah satu ikon kuliner, yaitu sentra Pia di Kecamatan Gempol, terus berkembang dan menjadi sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan pemasaran yang meluas ke Malang dan Surabaya. Potensi agroindustri juga dimanfaatkan dengan baik, seperti industri olahan apel, kopi, dan susu yang tumbuh di Kecamatan Tukur; serta industri aneka keripik yang tersebar di Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari, dan Purwodadi. Di wilayah pesisir, industri pengolahan hasil perikanan berkembang di Kecamatan Rejos, Lekok, Grati, Bangil, dan Beji. Terdapat pula produk unik seperti minuman herbal Pokak di Kecamatan Winongan serta olahan sirup dan dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri potensial ini memberikan optimisme dan harapan baru bagi penguatan ekonomi sektor riil daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Keberlanjutan industri kecil menengah ini juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur pemasaran yang strategis, seperti Kawasan Wisata Masjid Cheng Hoo, Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, kawasan Taman Dayu, serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol yang berfungsi sebagai etalase produk-produk lokal.

4. Potensi Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di

Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2025, wilayah ini memiliki bentang alam yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan secara terintegrasi dan berkualitas tinggi.

Keanekaragaman Sektor Pertanian dan Perkebunan Di sektor pertanian, Kabupaten Pasuruan memproduksi berbagai komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Purwodadi, Wonorejo, hingga Grati.

Kekuatan utama lainnya terletak pada sektor hortikultura yang terbagi berdasarkan topografi wilayah. Wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Tukur, Puspo, dan Tosari menjadi sentra sayuran dan buah subtropis, menghasilkan kentang, paprika, wortel, kubis, serta buah-buahan premium seperti apel dan stroberi. Sementara itu, wilayah dataran rendah dan menengah dikenal sebagai penghasil buah tropis unggulan, khususnya Mangga Gadung Klonal 21 dan Mangga Garifta, serta Alpukat, Pisang Cavendish, Durian, dan Jeruk. Tak hanya buah dan sayur, florikultura juga berkembang pesat dengan komoditas tanaman hias, Anggrek, Krisan, dan Bunga Sedap Malam yang banyak ditemui di wilayah Prigen, Rembang, dan Bangil.

Sektor perkebunan komersial didukung oleh komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tebu menjadi tanaman yang dominan di banyak kecamatan, disusul oleh Kopi dan Cengkeh yang tumbuh subur di lereng pegunungan, serta komoditas lain seperti Kapuk, Tembakau, dan Kelapa.

Sentra Peternakan yang Produktif Kabupaten Pasuruan juga dikenal sebagai sentra peternakan yang vital. Populasi ternak tersebar merata dengan spesialisasi tertentu. Komoditas sapi potong dan unggas (ayam buras, petelur, pedaging, itik) dapat ditemukan di hampir seluruh kecamatan. Namun, yang menjadi ciri khas adalah peternakan Sapi Perah. Wilayah seperti Tukur, Puspo, Purwodadi, Grati, dan Lekok menjadi pusat produksi susu segar yang signifikan. Selain itu, ternak kecil seperti kambing, domba, dan kelinci juga dikembangkan secara luas oleh masyarakat sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

Kekayaan Sektor Perikanan: Dari Kolam hingga Laut Potensi perikanan di Kabupaten Pasuruan melengkapi kekayaan agrarisnya. Sektor ini terbagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di empat kecamatan dataran tinggi (Tutur, Puspo, Tosari, dan Lumbang) yang memang difokuskan untuk agrikultur pegunungan.

Di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, dan Nguling sektor perikanan sangat dominan dengan hasil laut dan tambak. Perikanan tangkap menghasilkan tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap, kepiting, dan udang. Sementara itu, budidaya tambak (air payau) di wilayah ini memproduksi Bandeng, Udang (Windu, Vanamei), dan Rumput Laut dalam jumlah besar.

Untuk wilayah daratan (non-pesisir), budidaya perikanan air tawar berkembang pesat melalui metode kolam. Komoditas utamanya meliputi Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, dan Patin. Keunikan tersendiri terdapat di Kecamatan Grati, yang selain memiliki potensi laut, juga mengembangkan budidaya sistem Jaring Apung (kemungkinan besar di Ranu Grati) dengan komoditas seperti Nila, Tombro, dan Gurami.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan ekosistem ekonomi yang kuat dengan pembagian zonasi komoditas yang jelas antara wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir.

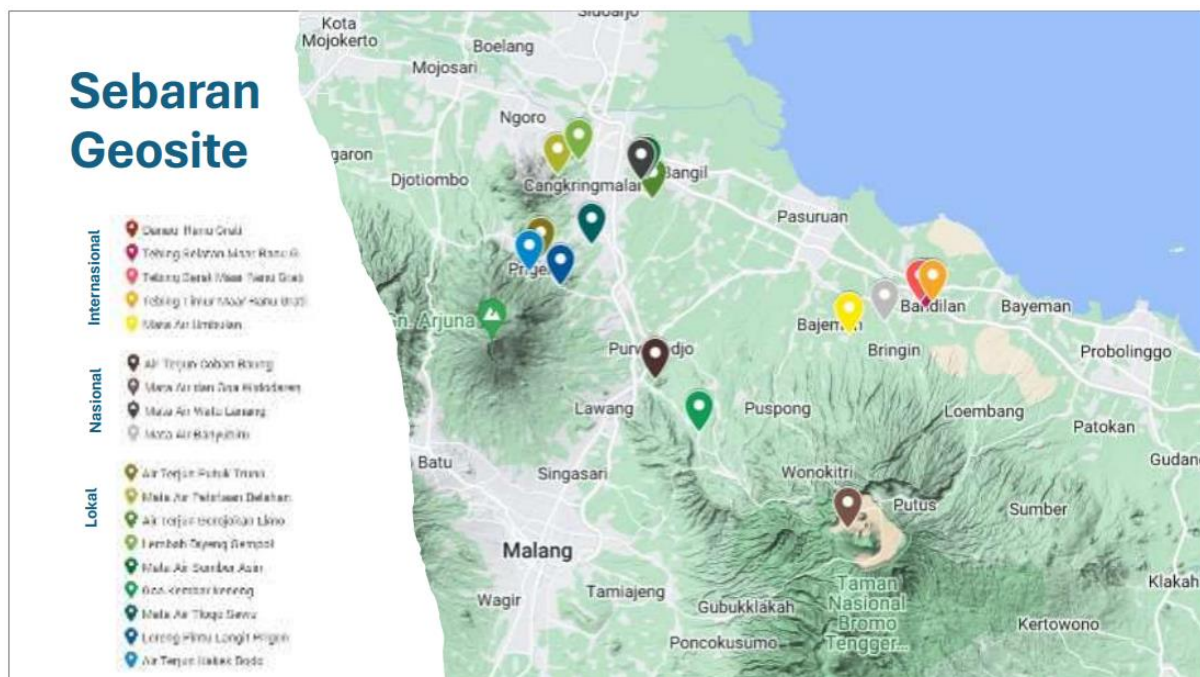
5. Potensi Keragaman Geologi

Berdasarkan pelaksanaan kajian mendalam mengenai Geoheritage (warisan geologi) yang dilakukan pada Tahun 2024, telah berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai bentuk keragaman geologi (geodiversity) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Temuan ini menunjukkan kekayaan fenomena geologis yang signifikan. Adapun hasil identifikasi geodiversity tersebut diklasifikasikan berdasarkan hierarki nilainya menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Geoheritage Bertaraf Internasional Pada tingkatan tertinggi ini, terdapat 5 (lima) situs geologi yang memiliki nilai signifikansi dunia. Situs-situs tersebut meliputi fenomena hidrologi Mata Air Artesis Umbulan, serta kompleks vulkanik purba Ranu Grati yang terdiri secara rinci atas Danau Maar Ranu Grati beserta formasi dinding kalderanya, yakni Tebing Barat

Maar Ranu Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, dan Tebing Selatan Maar Ranu Grati.

- 2) Geoheritage Bertaraf Nasional Pada tingkatan nasional, teridentifikasi sebanyak 4 (empat) situs geologi yang menjadi aset penting negara. Kelompok ini mencakup Mata Air Artesis Banyubiru, pesona alam Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, serta keunikan sistem hidrologi dan speleologi di Mata Air dan Goa Widodaren.
- 3) Geoheritage Bertaraf Lokal Pada tingkatan lokal, terdapat keragaman geologi yang paling banyak jumlahnya, yakni 9 (sembilan) situs. Situs-situs ini meliputi Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, bentang alam Lereng Pintu Langit Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, serta fenomena geologi unik Brown Canyon Gempol.



Gambar 2.4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Kajian Geoheritage Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

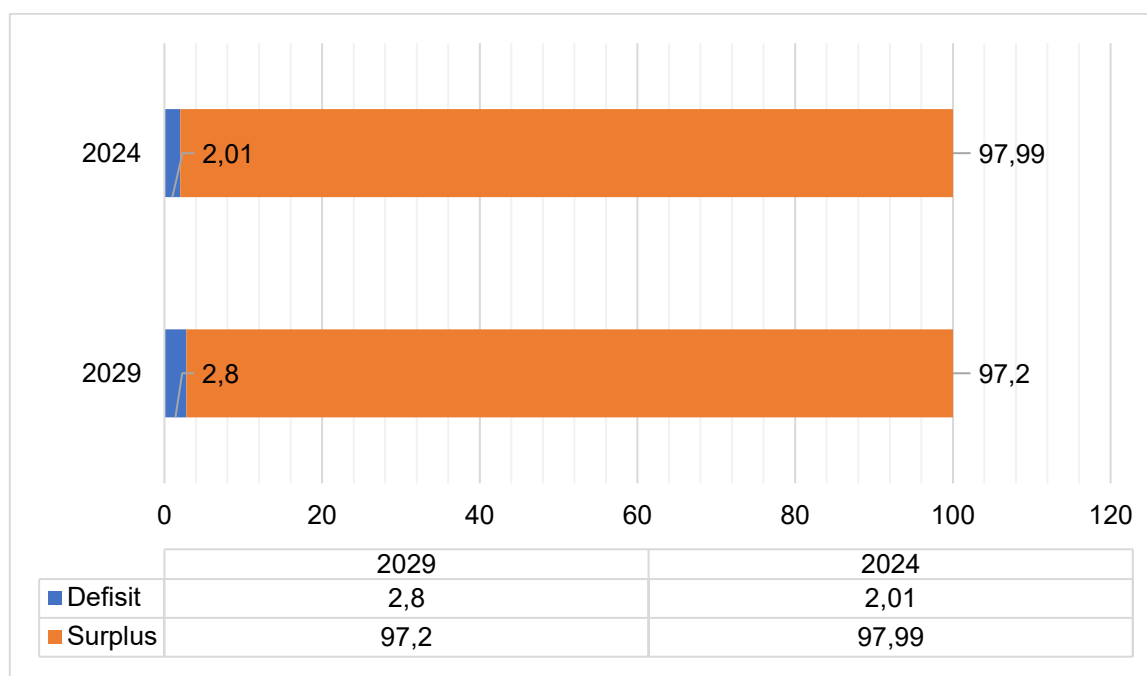
Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian, terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun

secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



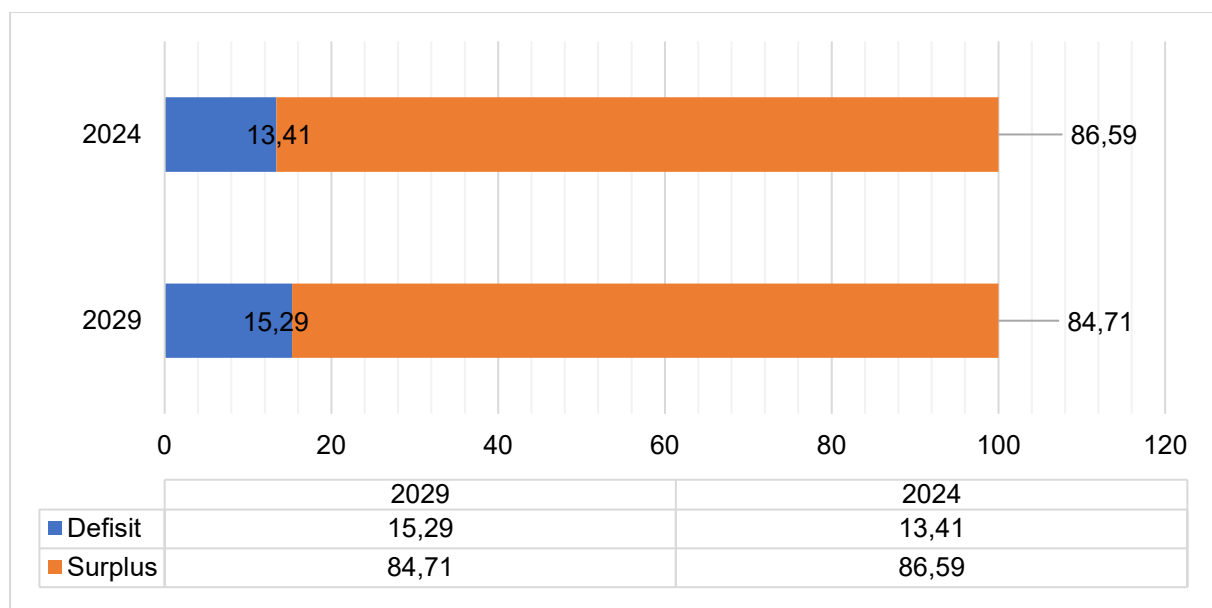
Gambar 2.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:



Gambar 2.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.4. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisi dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendorong permintaan energi.

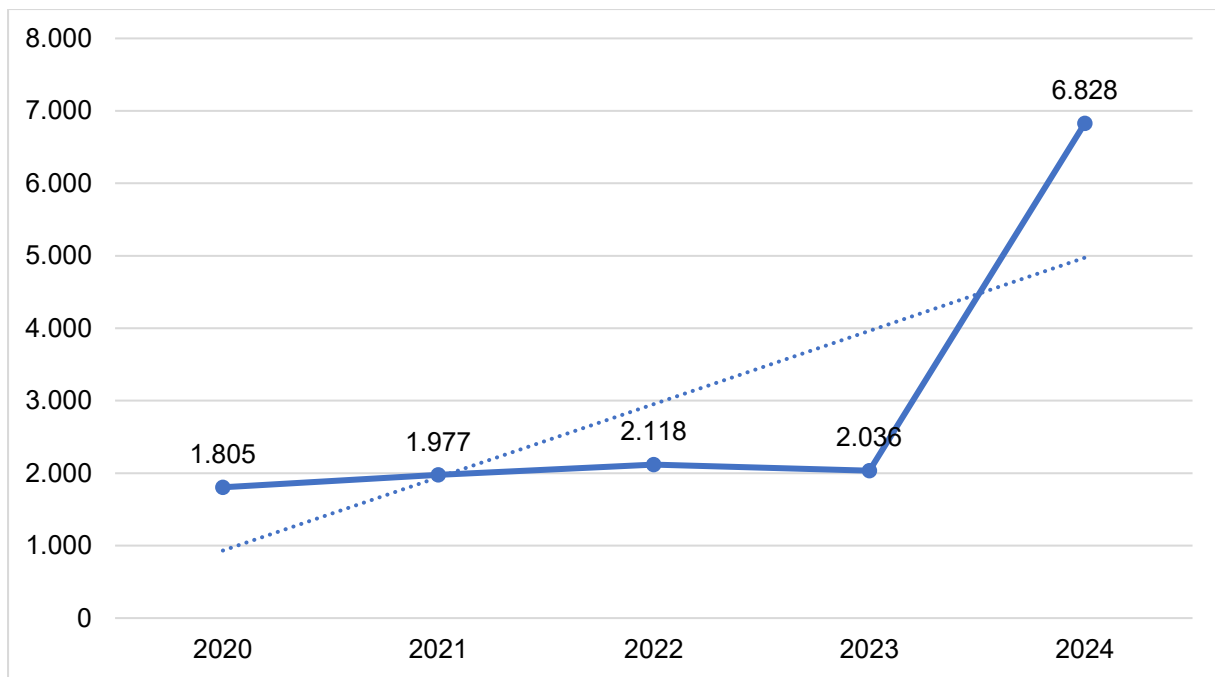
Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi

pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 2.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

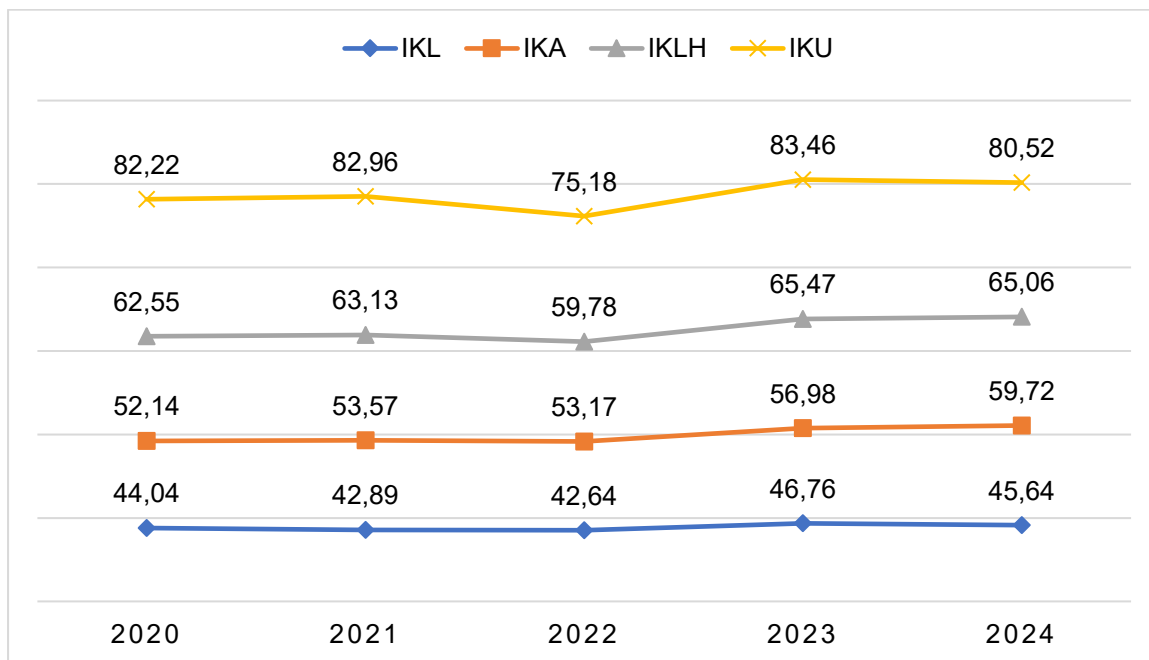
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang

sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang tepat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tanah, tetapi akan berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut..



Gambar 2.8 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh

merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.

2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.6. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai wilayah atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengalami dampak buruk dari berbagai jenis fenomena, baik itu bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia (*man-made disaster*). Tingginya tingkat kerawanan ini tidak terlepas dari karakteristik kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangat kompleks dan beragam. Keberadaan jajaran gunung berapi aktif, hamparan dataran rendah yang luas, serta kondisi ekologis dataran tinggi yang mulai mengalami degradasi

lingkungan, menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki spektrum potensi bencana alam yang cukup luas.

Berdasarkan pemetaan potensi, terdapat enam kategori utama kawasan rawan bencana di wilayah ini, yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Wilayah Kabupaten Pasuruan diapit oleh aktivitas vulkanik yang signifikan. Potensi ini terbagi menjadi dua klaster utama. Pertama, Kawasan Gunung Bromo yang memiliki area rawan bencana seluas 1.320 Ha serta daerah dengan status waspada seluas 751 Ha. Area ini secara administratif mencakup Desa Ngadirejo, Desa Mororejo, Desa Wonokitri, dan Desa Kedawung yang terletak di Kecamatan Tosari. Kedua, Kawasan Gunung Welirang yang memiliki area rawan bencana seluas 1.368 Ha dan daerah waspada seluas 809 Ha. Wilayah paparannya meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, serta meluas hingga Desa Cendono, Desa Sumberejo, dan Desa Tambaksari di wilayah Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah Mengingat topografi wilayah yang berbukit, potensi kawasan rawan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi cukup luas, yakni mencapai 37.626,4 Ha. Kerawanan ini secara spesifik terdapat di wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang curam, yaitu lebih dari 40% (kelerengan > 40%). Zona merah kerawanan longsor ini terkonsentrasi di kawasan dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Tuter, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan Rawan Banjir Ancaman hidrometeorologi berupa banjir memiliki potensi luasan terdampak sebesar 11.948,15 Ha. Bencana ini dominan mengancam wilayah dataran rendah atau daerah hilir yang menjadi muara dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kecamatan yang masuk dalam zona rawan ini antara lain Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Winongan. Mekanisme banjir umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan di

daerah hulu sungai yang tidak mampu tertampung sehingga mengakibatkan air meluap ke kawasan hilir. Selain banjir luapan sungai, terdapat pula ancaman banjir pasang air laut atau *rob* yang secara spesifik mengancam wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton.

4. Kawasan Rawan Angin Puyuh/Puting Beliung Fenomena cuaca ekstrem berupa angin puyuh atau puting beliung memiliki potensi kejadian di wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Sukorejo. Selain itu, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di beberapa kecamatan lain, mengingat adanya tren anomali iklim yang semakin tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir yang dapat memicu kejadian serupa di lokasi yang lebih luas.
5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Potensi kebakaran hutan mengancam wilayah-wilayah yang memiliki tutupan vegetasi hutan dan semak belukar yang kering, terutama saat musim kemarau. Area yang rentan meliputi Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, serta Taman Wisata Alam (TWA) Tretes. Selain itu, kawasan pegunungan di R. Soeryo serta kompleks Pegunungan Arjuno, Welirang, dan Penanggungan yang mencakup wilayah Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol juga memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.
6. Kawasan Rawan Kekeringan Ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan risiko berdasarkan intensitas dan dampaknya, yaitu:
 - Ancaman Kekeringan Tinggi: Berpotensi terjadi secara meluas di beberapa desa, meliputi:
 - Kecamatan Lumbang: Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbung.

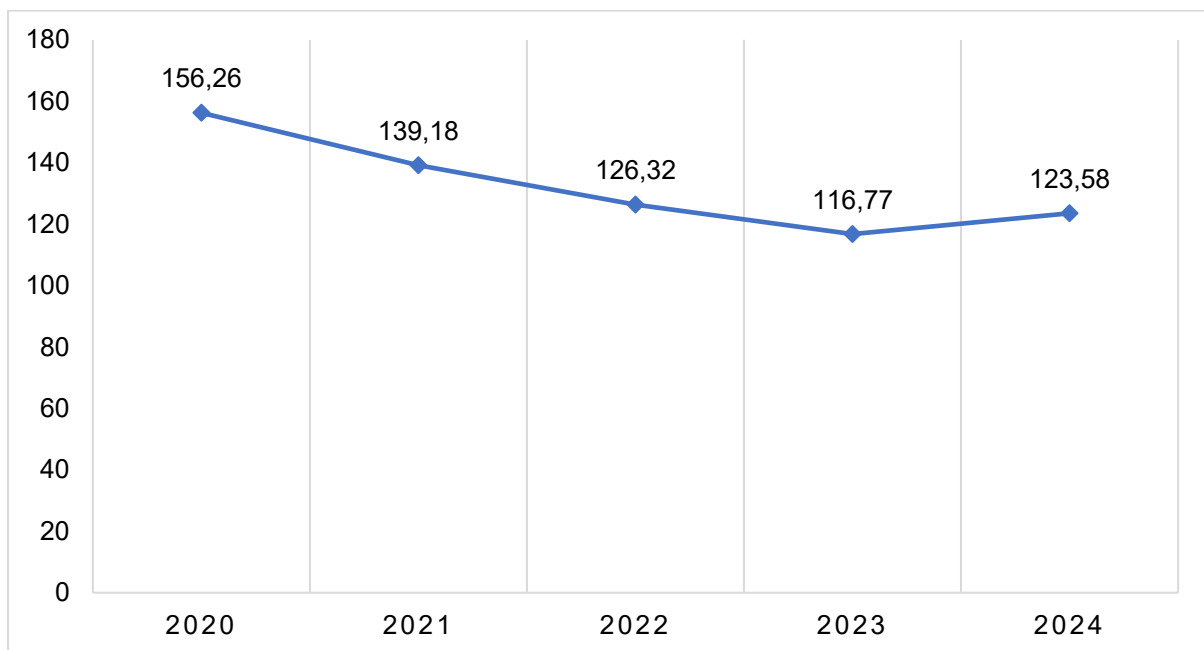
- Kecamatan Kejayan: Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo.
 - Kecamatan Lekok: Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang.
 - Kecamatan Winongan: Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi.
 - Kecamatan Puspo: Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran.
 - Kecamatan Gempol: Desa Bulusari.
 - Kecamatan Grati: Desa Karanglo.
- Ancaman Kekeringan Sedang: Teridentifikasi di wilayah Kecamatan Pasrepan, mencakup Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, dan Desa Tambakrejo.
 - Ancaman Kekeringan Rendah: Terjadi pada skala terbatas di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) serta Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Seluruh potensi kebencanaan yang telah diuraikan sebelumnya dipotret secara sistematis dan dianalisis secara komprehensif melalui instrumen Indeks Risiko Bencana (IRB). Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko secara kuantitatif dengan menilai probabilitas serta besaran dampak yang diperkirakan akan muncul apabila suatu ancaman benar-benar termanifestasi menjadi peristiwa bencana di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, IRB tidak hanya merekam keberadaan ancaman, tetapi juga menggambarkan konsekuensi nyata yang mungkin ditimbulkan terhadap manusia, aset, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi wilayah.

Secara metodologis, IRB merupakan hasil integrasi dari tiga komponen utama, yaitu indeks ancaman (hazard) yang merepresentasikan intensitas dan frekuensi potensi bahaya, indeks kerentanan (vulnerability) yang mencerminkan tingkat

keterpaparan dan kelemahan sistem sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan, dan indeks kapasitas (capacity) yang menunjukkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap bencana. Interaksi ketiga komponen tersebut menghasilkan gambaran risiko yang utuh dan proporsional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang objektif dan terukur.

Hasil pengkajian risiko bencana berbasis IRB ini menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Strategi PRB diarahkan secara simultan untuk menekan tingkat bahaya dan kerentanan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan aspek sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, IRB berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan yang bersifat preventif dan berorientasi pada ketahanan wilayah. Adapun tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan secara visual disajikan dalam gambar berikut sebagai ilustrasi dinamika tingkat risiko bencana dari waktu ke waktu.:



Gambar 2.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

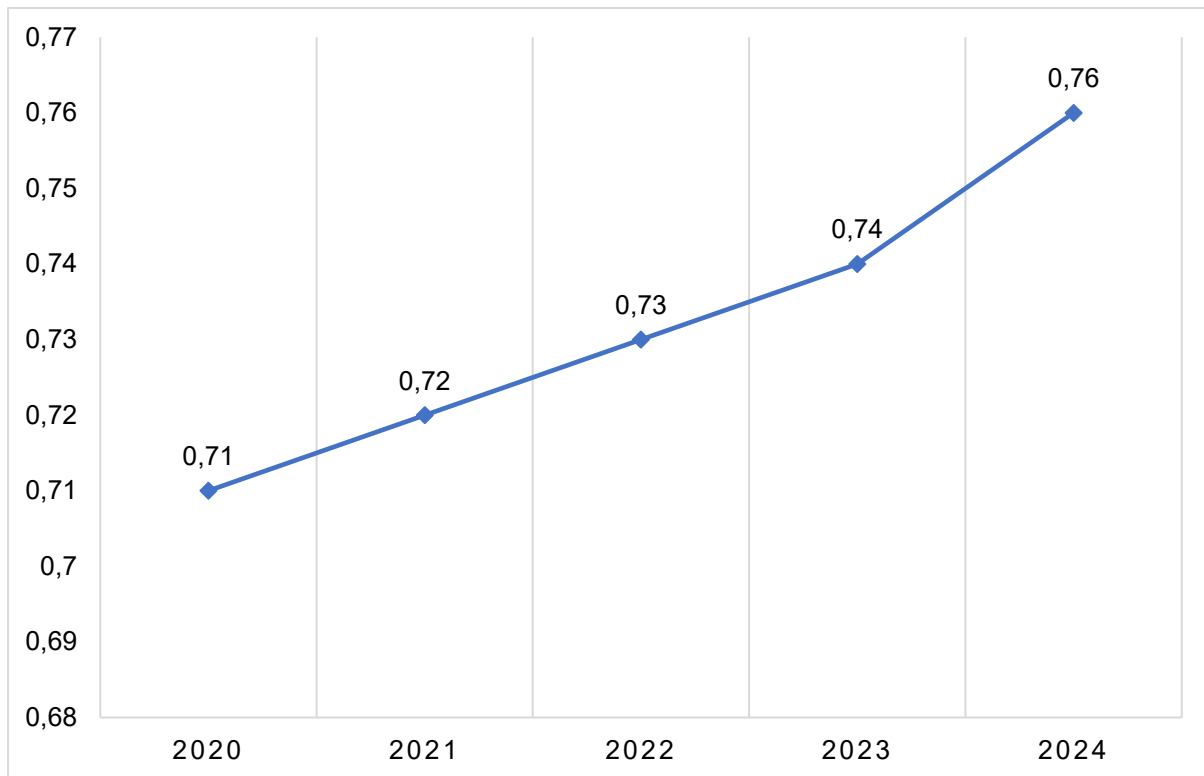
Catatan: Tahun 2024 menggunakan data H&V 2021

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data runtun waktu (*time series*) yang mencakup periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kinerja penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan memperlihatkan capaian yang sangat positif dan menggembirakan. Indikator keberhasilan ini tercermin jelas dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang secara konsisten mengalami tren penurunan di setiap tahun pelaporannya. Akumulasi dari berbagai upaya strategis penurunan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan ini telah berhasil mengubah peta kerawanan daerah, sehingga menempatkan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori risiko bencana tingkat Sedang, sebuah perbaikan status yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian substansial dalam penurunan risiko bencana ini didorong secara signifikan oleh penguatan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak, utamanya melalui akselerasi program pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Progresivitas pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh ini terlihat sangat nyata dari data pertumbuhan tahunan yang terus menunjukkan grafik meningkat. Pada tahun 2020, tercatat baru terdapat 10 desa/kelurahan yang berstatus tangguh bencana. Jumlah ini kemudian bertambah secara bertahap menjadi 14 desa/kelurahan pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 18 desa/kelurahan pada tahun 2022, dan mencapai 20 desa/kelurahan pada tahun 2023. Puncaknya, terjadi lonjakan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024 dengan total capaian kumulatif sebanyak 30 desa/kelurahan yang telah berhasil dikukuhkan statusnya sebagai wilayah tangguh bencana.

Ditinjau secara teoritis maupun praktis, tren penurunan nilai IRB ini memiliki korelasi linier yang kuat dan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman. Fenomena positif ini selaras dengan naiknya grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebuah metrik yang merepresentasikan tingkat kesiapan dan ketangguhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola keseluruhan siklus manajemen bencana. Peningkatan ketahanan daerah yang solid ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun di atas fondasi penguatan lima pilar utama kapasitas yang fundamental, yaitu penguatan struktur kelembagaan yang responsif, optimalisasi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang akurat, penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang masif kepada publik, serta

implementasi upaya mitigasi fisik maupun non-fisik dan kesiapsiagaan yang terencana dengan matang. Gambaran komprehensif mengenai hubungan kausalitas antara penurunan risiko dan peningkatan ketahanan daerah ini disajikan secara visual dalam Gambar berikut:



Gambar 2.10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

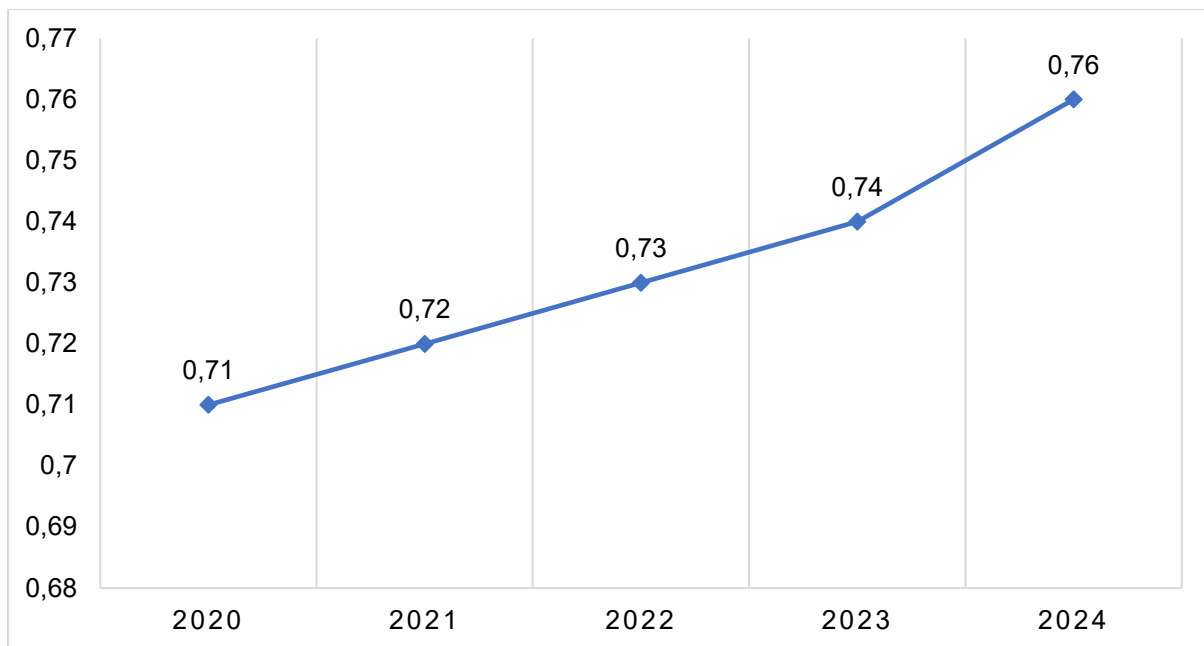
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Eskalasi fenomena bencana alam yang melanda suatu wilayah kini tidak lagi dapat dipandang secara parsial sebagai akibat tunggal dari faktor kerawanan geofisik lokal semata. Lebih jauh dari itu, frekuensi dan intensitas bencana telah berakselerasi secara dramatis akibat dampak destruktif dari fenomena global perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu efek domino yang luas, sistemik, dan multidimensi, yang tidak hanya mengancam stabilitas pertumbuhan sektor ekonomi dan menghambat produktivitas daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat secara umum melalui munculnya vektor penyakit baru, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang vital. Secara spesifik, ancaman langsung yang paling nyata dan meresahkan dari krisis iklim ini bermanifestasi dalam bentuk kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang secara spesifik membahayakan keberlangsungan kawasan

pesisir melalui ancaman abrasi dan banjir rob, serta anomali cuaca berupa peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang polanya semakin volatil, acak, dan sulit diprediksi dampaknya.

Merespons dinamika lingkungan yang semakin kritis tersebut, implementasi upaya mitigasi perubahan iklim menjadi langkah mutlak, imperatif, dan mendesak yang harus dilakukan guna mereduksi risiko kerusakan sistemik bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam kerangka strategis ini, pelaksanaan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menempati posisi sentral sebagai langkah fundamental atau batu pijakan awal. Upaya inventarisasi ini bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, valid, dan komprehensif guna mengidentifikasi, mengukur, serta memetakan sumber-sumber emisi karbon secara presisi. Tujuannya adalah agar strategi pengurangan emisi dapat dirumuskan secara *evidence-based* dan dieksekusi secara terukur, sistematis, serta tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas yang menjadi penyumbang emisi terbesar, seperti sektor energi, limbah, maupun pertanian.

Selanjutnya, efektivitas kinerja mitigasi daerah ini dievaluasi secara ketat melalui indikator intensitas emisi GRK, dengan fokus utama pada parameter Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂eq). Berdasarkan hasil pemantauan data terintegrasi melalui platform Sistem Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Nasional Rendah Karbon (AKSARA) dengan data mutakhir yang diakses pada tanggal 30 Mei 2024, tercatat fakta yang menggembirakan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif berupa kenaikan grafik yang sangat signifikan sejak tahun dasar 2020. Lonjakan capaian angka potensi penurunan ini bukan sekadar representasi statistik di atas kertas semata, melainkan sebuah manifestasi konkret dari kuatnya komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam berkontribusi aktif menyukseskan upaya global mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang rendah karbon, hijau, dan berkelanjutan. Adapun rincian detail mengenai tren capaian komitmen penurunan emisi ini divisualisasikan secara lengkap pada Gambar berikut:



Gambar 2.11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

2.7. Demografi

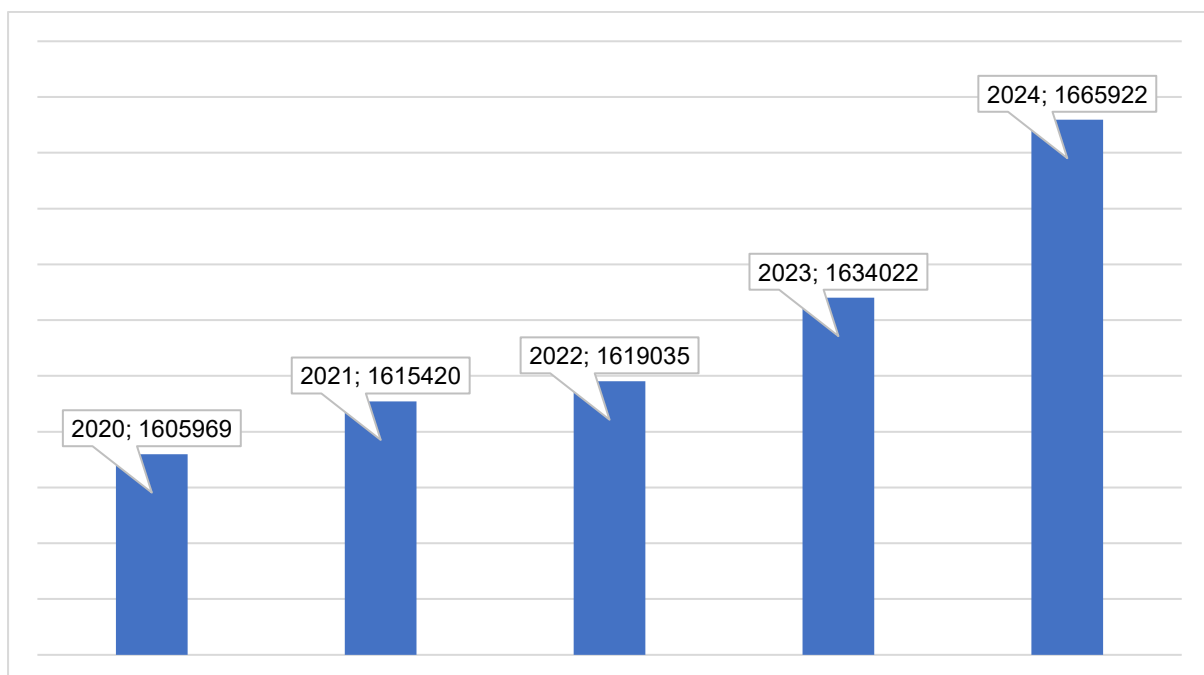
Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan,

dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969

jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan.

Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

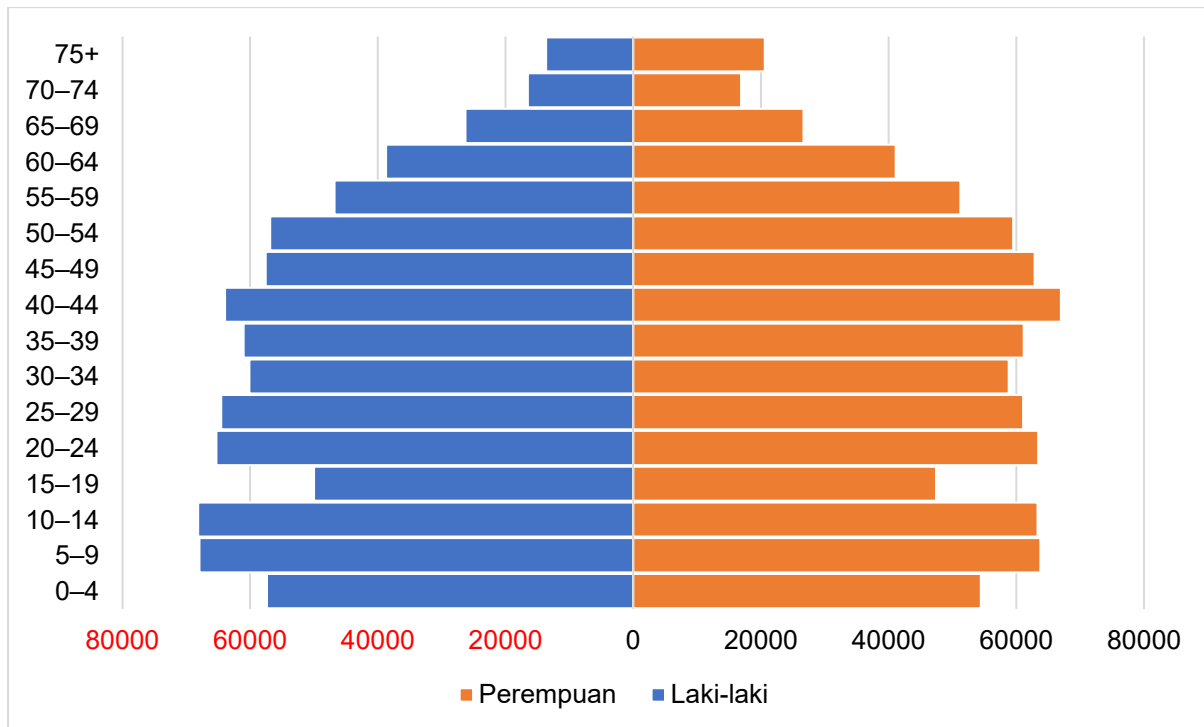
Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnean, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 2.13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.

2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

C. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
Kabupaten Pasuruan		1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km^2). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/ km^2 , angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/ km^2 . Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya

seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/km²) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/km². Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/km²) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/km²), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65

21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan, serta

keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2.11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorar	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025
(Data diolah)*

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai

30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat	15,25	14,56	14,05	13,78
	SD/ sederajat				
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat	13,55	13,37	13,24	13,24
	SLTP/ sederajat				
5	Tamat SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghuchu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

Tabel 2.15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025,
diolah*

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun 2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030.

Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten
Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribuan Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km ²)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan,
2024, diolah*

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi

Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.

Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.8. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata

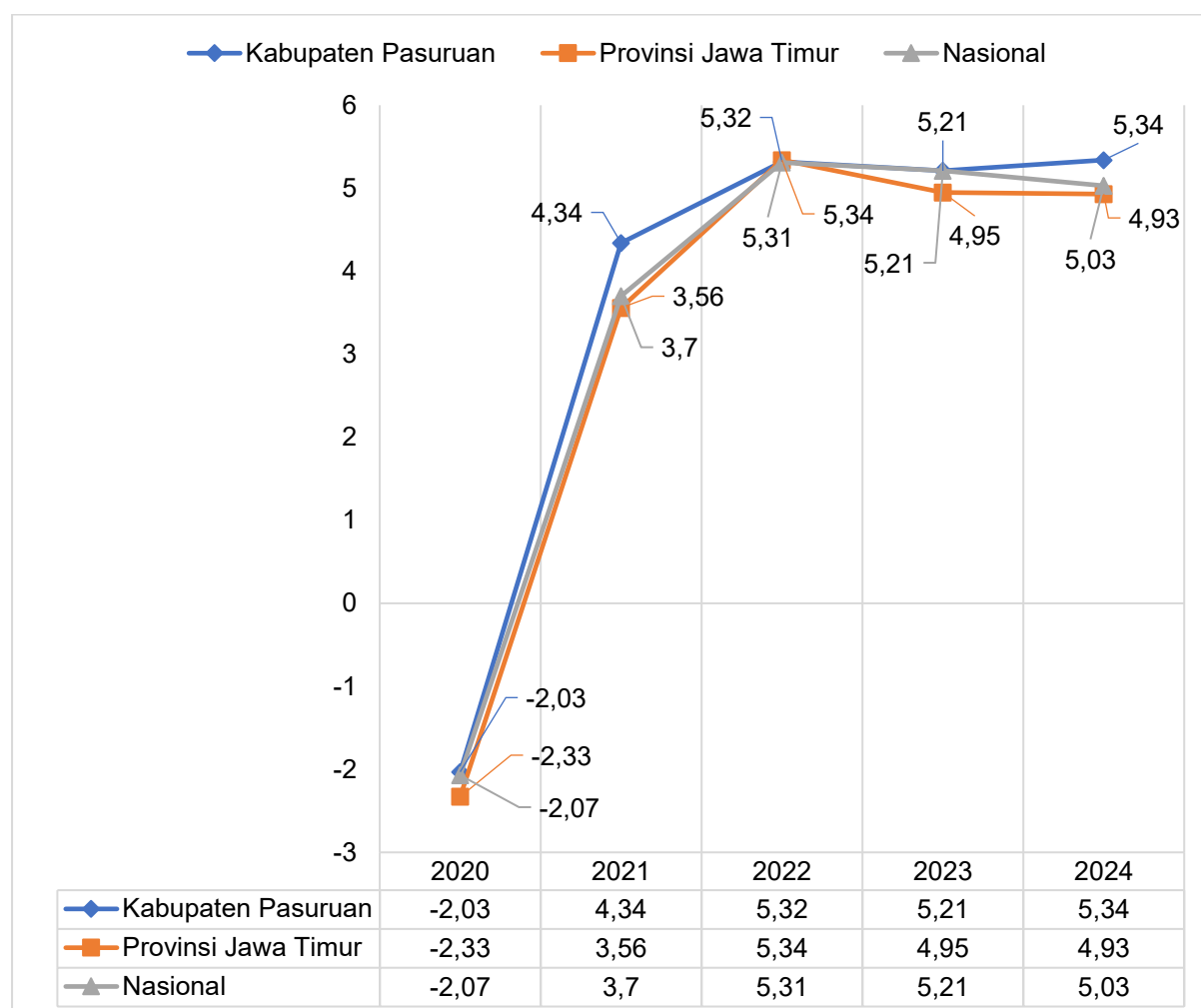
pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun

beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.



Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

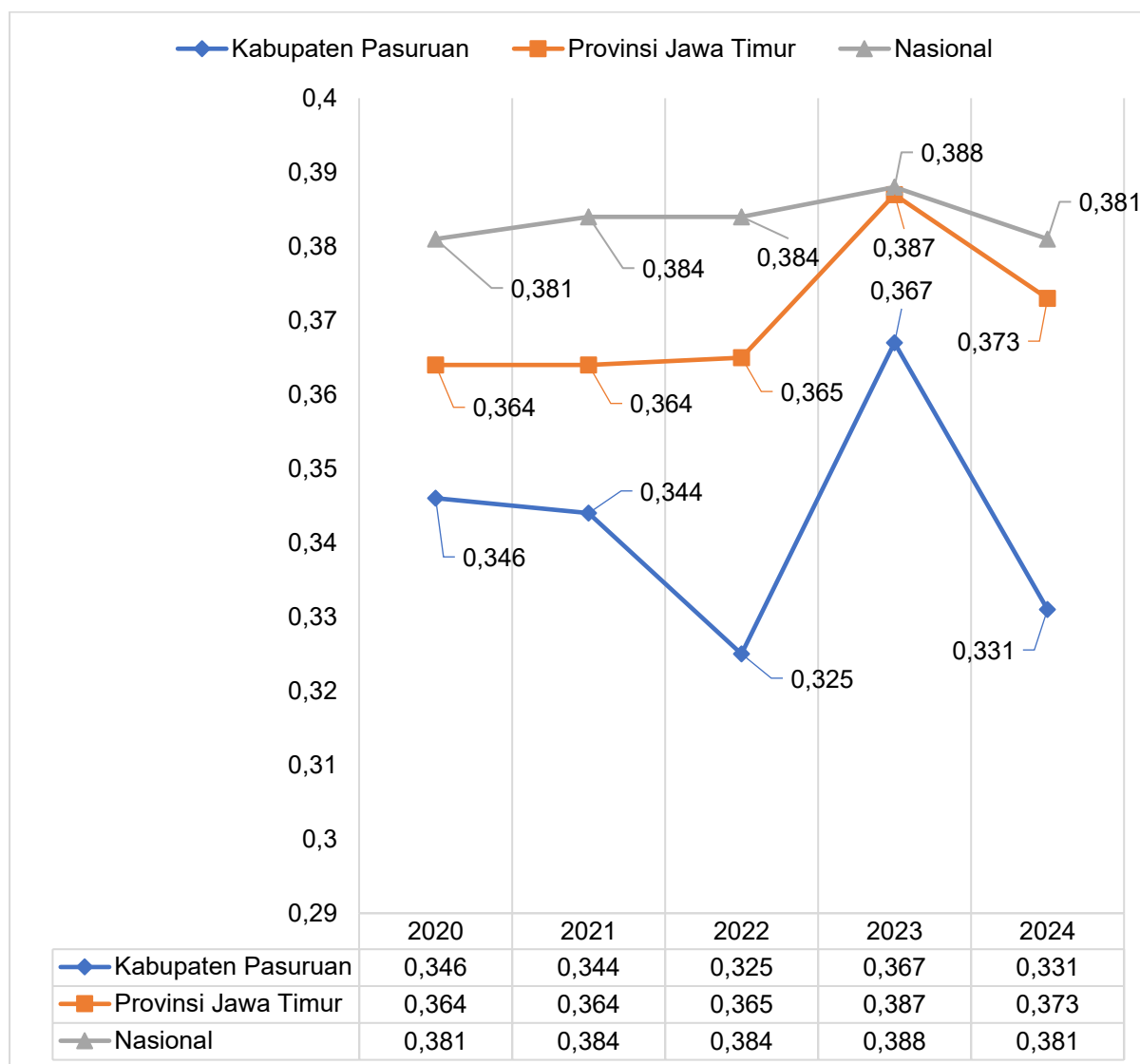
B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325. Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.15 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

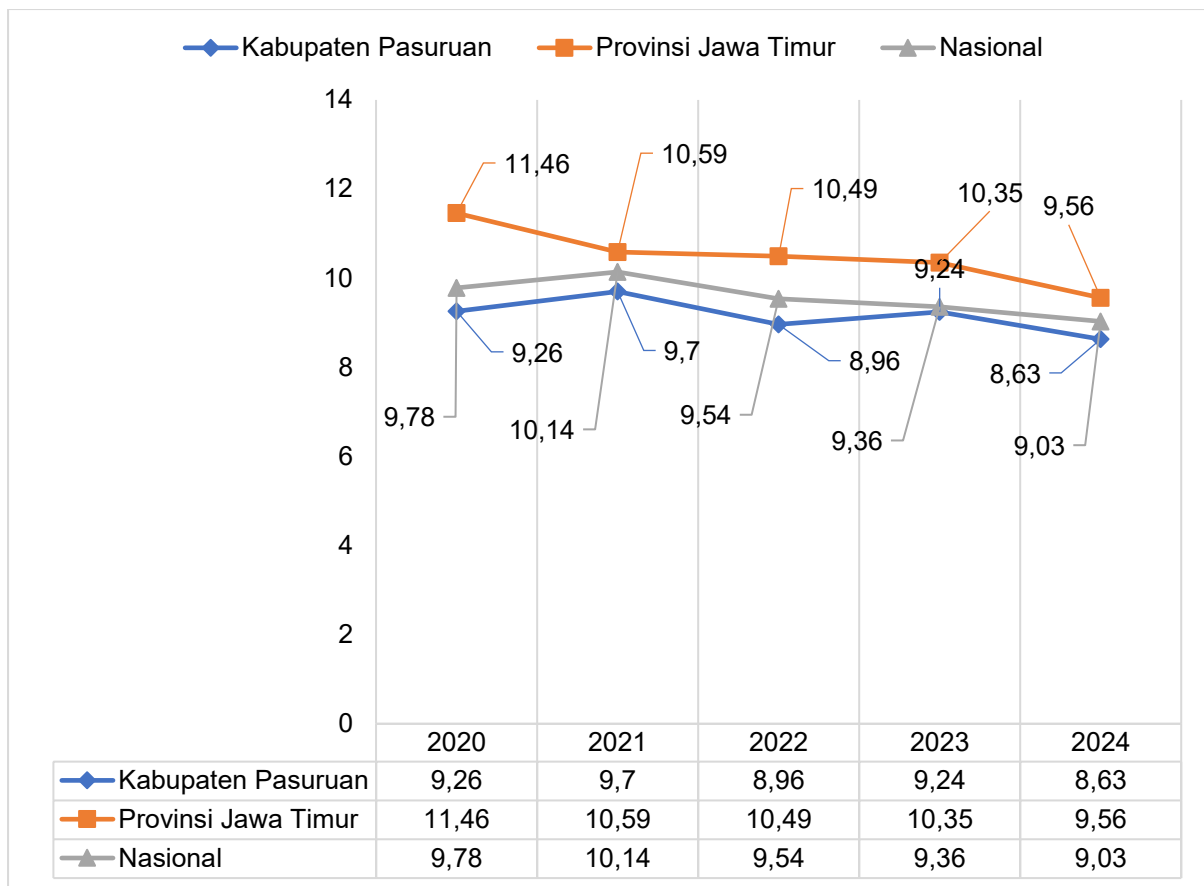
Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2.16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2.18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

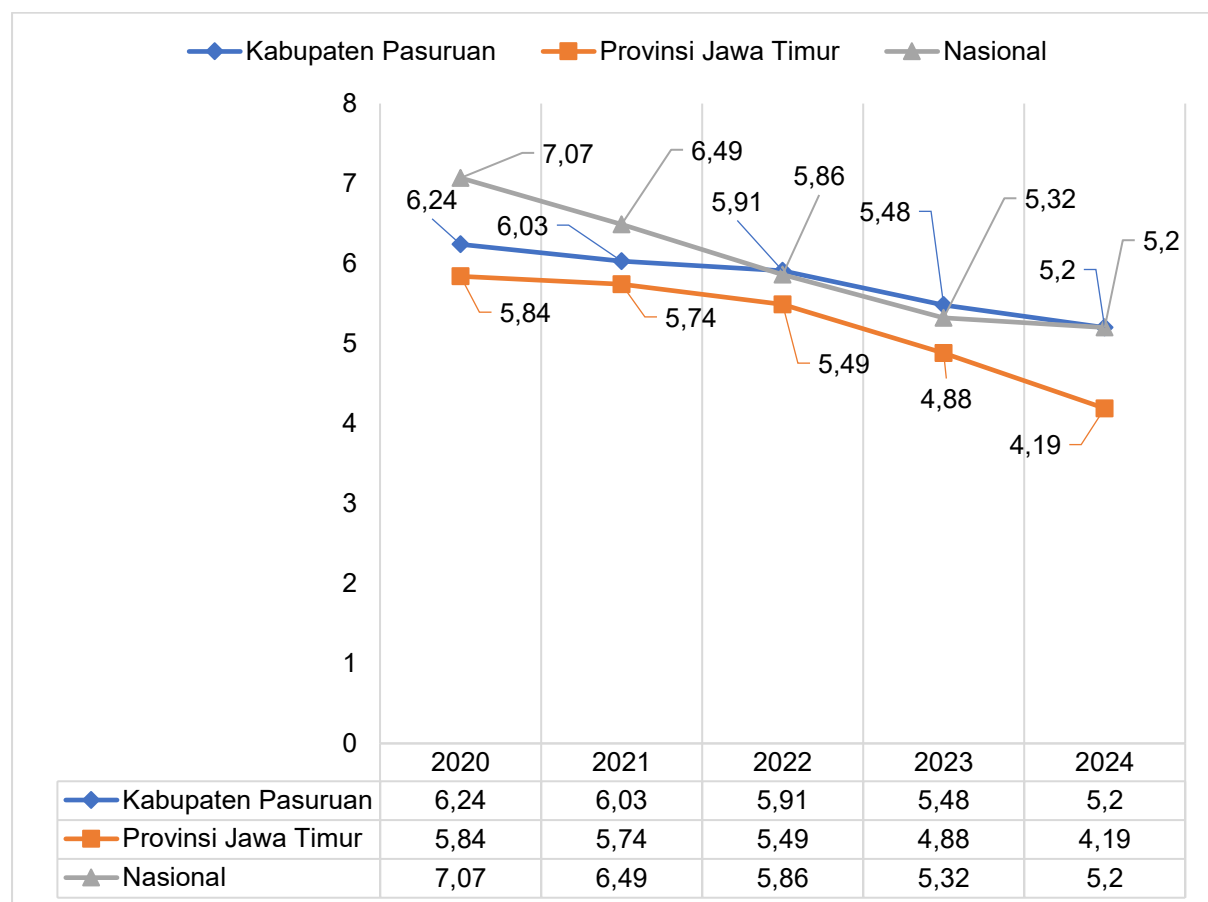
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 2.17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

E. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2.19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" (IPM $\geq$ 70) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2.20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78

Uraian	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

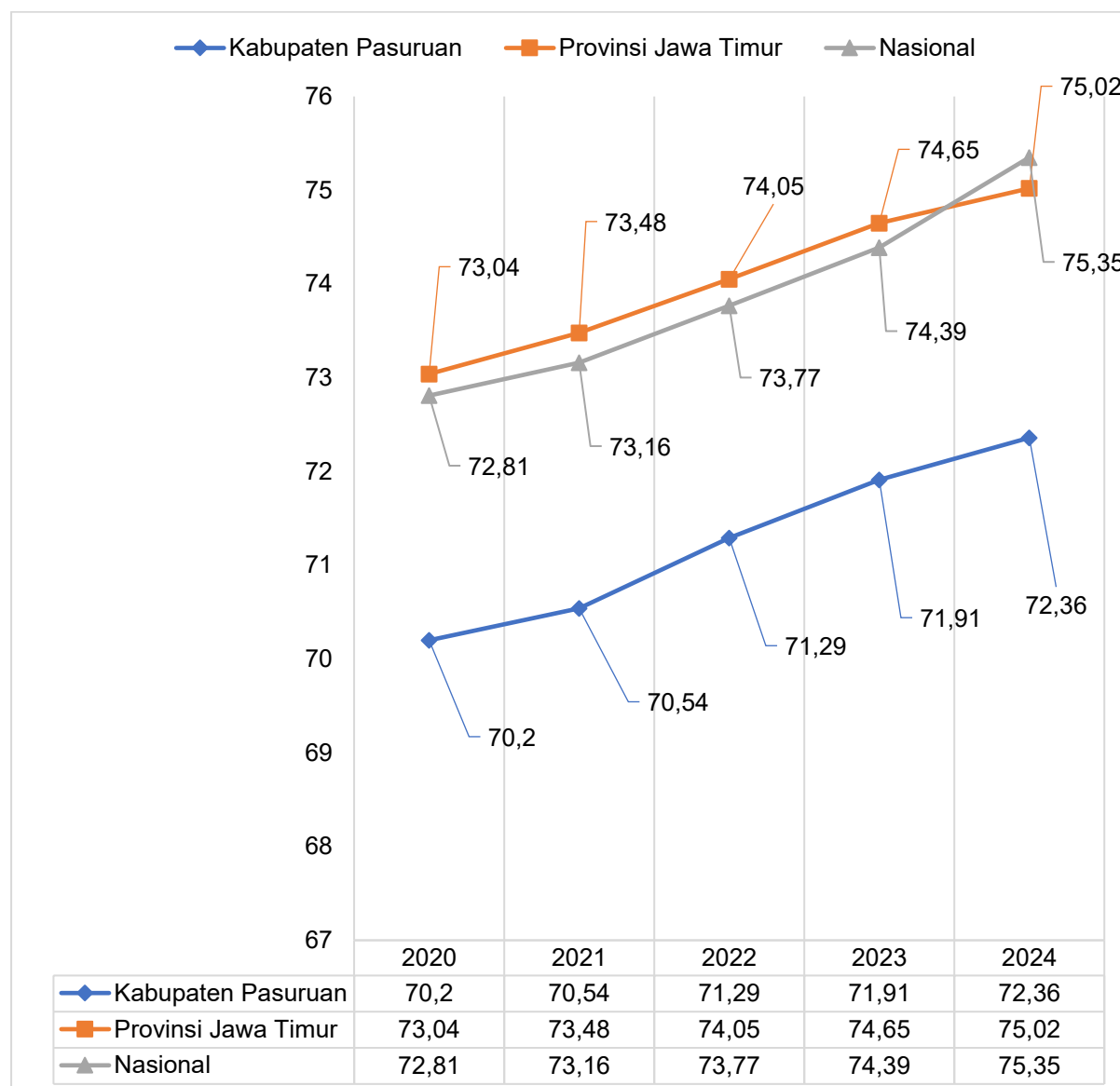
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif

ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

BAB III

KERANGKA STRATEGIS DAN PELAKSANAAN

3.1. Penyelarasan Visi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten

Konsistensi arsitektur perencanaan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi secara vertikal mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten merupakan imperatif mutlak guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan bernegara. Dalam perspektif manajemen strategis sektor publik, koherensi dokumen perencanaan ini berfungsi sebagai mitigasi risiko fragmentasi kebijakan dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan di daerah berkontribusi langsung terhadap agregat kinerja nasional. Berdasarkan penelaahan mendalam terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pada tiga tingkatan pemerintahan, teridentifikasi sebuah benang merah yang kokoh (*strong strategic alignment*) dalam cita-cita mewujudkan kemajuan peradaban yang inklusif dan keberlanjutan pembangunan antargenerasi.

Pada level makro, Visi Nasional "Indonesia Emas 2045" sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, meletakkan fondasi ideologis pada kedaulatan, kemajuan, dan keberlanjutan. Visi ini kemudian diterjemahkan secara linear dan derivatif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui RPJPD 2025-2045 dengan visi "Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan". Penambahan diksi "Berakhlak" dan "Mendunia" menegaskan posisi Jawa Timur yang tidak hanya berorientasi pada daya saing global, namun juga tetap berakar pada nilai-nilai integritas sosial. Semangat transformasi ini selanjutnya diinternalisasi secara spesifik dan kontekstual oleh Kabupaten Pasuruan melalui visi "Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045" yang dioperasionalkan dalam rumusan RPJPD menjadi "Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan". Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah menempatkan dirinya sebagai subsistem integral dalam ekosistem pembangunan nasional dan provinsi.

Secara substansial, ketiga strata visi tersebut berkonvergensi pada kluster kata kunci strategis, yakni: "Maju", "Sejahtera/Makmur", dan "Berkelanjutan". Konvergensi terminologi ini bukan sekadar kesamaan semantik, melainkan cerminan kesatuan arah kebijakan. Dalam konteks urgensi Laporan Percepatan Pelaksanaan Program

Makan Bergizi Gratis (MBG), linearitas visi ini memberikan legitimasi teknokratik yang kuat. Program MBG tidak dapat dipandang sebagai program bantuan sosial parsial semata, melainkan harus dimaknai sebagai intervensi hulu (upstream intervention) dalam pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Logika deduktifnya adalah sebagai berikut: Visi "Maju" dan "Mendunia" pada tahun 2045 mustahil tercapai tanpa modal dasar SDM yang memiliki kapasitas kognitif tinggi dan status kesehatan prima. Oleh karena itu, Program MBG berfungsi sebagai instrumen katalisator untuk memutus mata rantai malnutrisi dan stunting, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan generasi "Cemerlang" di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, pelaksanaan MBG di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 adalah langkah taktis operasional untuk meletakkan batu pertama bagi pencapaian visi strategis jangka panjang di ketiga level pemerintahan tersebut.

Berikut adalah matriks persandingan visi pada tiga level pemerintahan yang menjadi landasan ontologis dan strategis program MBG di Kabupaten Pasuruan:

Tabel 3.1 Persandingan Visi Pusat, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan

Tingkat Pemerintahan	Dokumen Induk	Rumusan Visi Jangka Panjang & Visi Kepala Pemerintahan
Nasional	RPJPN 2025-2045	"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan."
	Visi Presiden	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045
Provinsi Jawa Timur	RPJPD 2025-2045	"Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan."
	Visi Gubernur	Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
Kabupaten Pasuruan	RPJPD 2025-2045	"Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan."
	Visi Bupati	Kabupaten Pasuruan Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan

3.2. Integrasi Asta Cita Presiden dengan Misi Daerah

Sebagai panduan operasional tertinggi dalam mengakselerasi terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 (delapan) Misi Prioritas Nasional yang dikristalisasi dalam "Asta Cita". Dalam perspektif otonomi daerah, keberhasilan agenda nasional ini sangat bergantung pada daya adaptasi pemerintah daerah dalam menerjemahkannya ke dalam kebijakan lokal yang presisi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara proaktif menyelaraskan kedelapan butir Asta Cita tersebut dengan 5 (lima) Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan (Panca Karsa). Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi program di daerah tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki daya ungkit (*leverage*) nyata terhadap pencapaian indikator kinerja utama nasional.

Di tengah arsitektur perencanaan ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi sentral dan strategis. Program ini bukan sekadar kebijakan sektoral bidang kesehatan atau pendidikan semata, melainkan merupakan titik temu (*nexus*) antara upaya radikal pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Berdasarkan analisis komparatif terhadap dokumen perencanaan pusat dan daerah, teridentifikasi korelasi kausalitas yang kuat antara Asta Cita dengan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang dijabarkan dalam tiga dimensi strategis sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia: Investasi Kognitif dan Kesehatan (Core Alignment) Pilar fundamental Program MBG adalah intervensi gizi spesifik guna mencetak generasi yang kompetitif secara fisik dan intelektual. Hal ini merupakan manifestasi operasional dari Asta Cita Ke-4, yang mengamanatkan negara untuk "*Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan...*". Amanat nasional ini direspons secara tegak lurus oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Misi Ke-3, yaitu "*Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul Dan Produk Asli Pasuruan Yang Kompetitif*". Dalam konteks ini, integrasi kedua misi tersebut memberikan landasan yuridis dan filosofis yang kokoh. Program MBG di Kabupaten Pasuruan dimaknai sebagai kewajiban konstitusional daerah untuk menyediakan asupan gizi yang layak bagi siswa. Logika teknokratiknya adalah: perbaikan asupan gizi akan meningkatkan status kesehatan dan kapasitas

- kognitif anak didik, yang pada akhirnya menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya SDM unggul sesuai target Misi Daerah.
2. Dimensi Ekonomi Inklusif: Kemandirian Pangan dan Multiplier Effect Program MBG didesain dengan model rantai pasok tertutup (*closed-loop supply chain*) yang memprioritaskan penggunaan pangan lokal. Pendekatan ini selaras penuh dengan Asta Cita Ke-2 mengenai *"kemandirian bangsa melalui swasembada pangan..."* serta Asta Cita Ke-6 yang menekankan pada *"Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi..."*. Di tingkat daerah, paradigma ini beririsan langsung dengan Misi Ke-2 Bupati Pasuruan, yakni *"Memperkecil Ketimpangan Dan Kesenjangan Sosial Ekonomi..."* dan Misi Ke-4 tentang *"Memperkuat Sinergitas Antara Pemerintah... Dunia Usaha Dan Masyarakat"*. Implementasinya, belanja anggaran MBG akan diarahkan secara agresif untuk menyerap komoditas dari petani, peternak, dan UMKM lokal di wilayah Kabupaten Pasuruan. Mekanisme ini diharapkan menciptakan efek pengganda ekonomi (*economic multiplier effect*) yang signifikan di wilayah perdesaan, sekaligus memberdayakan Koperasi dan UMKM sebagai aktor utama penyedia jasa boga.
 3. Dimensi Tata Kelola: Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan program berskala masif seperti MBG menuntut standar pengawasan yang ketat. Hal ini merujuk pada Asta Cita Ke-7 terkait *"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi"*. Di Kabupaten Pasuruan, semangat ini diinternalisasi melalui Misi Ke-5, yaitu *"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik... Serta Aparatur Pemerintah Yang Lebih Profesional dan Humanis"*. Oleh karena itu, struktur Satuan Tugas (Satgas) MBG di Kabupaten Pasuruan wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi dalam setiap tahapan pelaporannya, guna mencegah kebocoran anggaran dan memastikan program tepat sasaran.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai keterpaduan strategis tersebut, berikut disajikan matriks persandingan antara Asta Cita Presiden dengan Misi Bupati Pasuruan yang menjadi basis legitimasi percepatan program prioritas ini:

Tabel 3.2 Persandingan Asta Cita Presiden dan Misi Bupati Pasuruan

Asta Cita Presiden	Misi Bupati	Implikasi Program MBG
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga...	Misi 3: Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul Dan Produk Asli Pasuruan Yang Kompetitif.	MBG sebagai intervensi spesifik gizi untuk mencegah stunting dan meningkatkan kapasitas kognitif siswa (SDM Unggul).
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan...	Misi 4: Memperkuat Sinergitas Antara Pemerintah... Dunia Usaha Dan Masyarakat Sebagai Pilar Membangun Daerah.	Pelibatan UMKM, Koperasi, dan Petani lokal dalam rantai pasok (<i>supply chain</i>) bahan pangan MBG.
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Misi 2: Memperkecil Ketimpangan Dan Kesenjangan Sosial Ekonomi Melalui Program Tepat Guna Dan Tepat Sasaran.	Distribusi ekonomi ke wilayah pedesaan melalui Dapur SPPG dan target sasaran siswa dari keluarga miskin.
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik... Serta Aparatur Pemerintah Yang Lebih Profesional dan Humanis.	Tata kelola Satgas MBG yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi dalam pelaporan.

3.3. Matriks Penyelarasan Program Prioritas (Quickwin)

Efektivitas implementasi kebijakan pembangunan nasional di tingkat sub-nasional tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi anggaran yang digelontorkan, melainkan sangat bergantung pada derajat keselarasan (*degree of alignment*) antara visi strategis pemerintah pusat dengan agenda prioritas lokal. Dalam kerangka

perencanaan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan strategi "Cascading Kebijakan Terintegrasi" guna menjamin bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang dialokasikan tidak hanya berfungsi menyelesaikan problematika lokal secara parsial, tetapi juga berkontribusi secara agregat terhadap pencapaian indikator kinerja nasional. Penyelarasan ini mengorkestrasi tiga lapisan kebijakan utama, yakni 8 Misi Asta Cita Presiden sebagai landasan ideologis jangka panjang, Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) sebagai akselerator taktis jangka pendek, dan 33 Program Prioritas "Pasuruan Maslahat" sebagai instrumen eksekusi operasional di lapangan. Dalam arsitektur perencanaan ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diposisikan sebagai program sektoral bidang kesehatan semata, melainkan sebagai Program Lintas Sektoral yang Integratif (*Cross-Cutting Program*) yang menyatukan dimensi pembangunan manusia dan dimensi ekonomi kerakyatan.

A. Konstruksi Kebijakan Nasional: Transformasi Ideologi Menjadi Aksi Cepat

Asta Cita Presiden meletakkan fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang dibangun di atas dua pilar utama yang saling menopang, yaitu pilar pembangunan manusia dan pilar ekonomi kerakyatan. Pilar pertama tercermin secara eksplisit dalam Asta Cita Ke-4 yang mengamanatkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang (*long-term investment*) untuk menciptakan bonus demografi yang produktif. Sementara itu, pilar kedua termanifestasi dalam Asta Cita Ke-3 dan Ke-6 yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja berkualitas serta pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa untuk pemerataan. Sinergi kedua pilar ini menegaskan bahwa negara harus hadir tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan ekonomi warganya melalui penciptaan ekosistem usaha yang inklusif.

Untuk menerjemahkan mandat makro tersebut secara cepat dan berdampak langsung ke akar rumput, Pemerintah Pusat menetapkan *Quick Win* Nomor 1 berupa pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Keputusan menempatkan program MBG sebagai prioritas utama didasarkan pada analisis dampak ganda (*multiplier effect*) yang bekerja pada dua sisi kurva ekonomi sekaligus. Pada sisi permintaan (*demand side*), intervensi gizi berfungsi

memperbaiki kualitas modal manusia (*Human Capital*) dan menurunkan prevalensi stunting yang menjamin produktivitas masa depan. Sedangkan pada sisi penawaran (*supply side*), proses penyediaan jutaan porsi makan setiap hari akan menciptakan permintaan pasar baru yang masif bagi produk pangan lokal, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi riil dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

- B. Respon Teknokratik Daerah: Operasionalisasi Melalui 33 Program Prioritas
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespons arsitektur kebijakan nasional tersebut secara adaptif dengan mengaktivasi 33 Program Prioritas Daerah, di mana Program MBG diintegrasikan (*embedded*) ke dalam program prioritas yang sudah ada untuk menjamin keberlanjutan dan legalitas pelaksanaan. Berdasarkan analisis substansi dokumen perencanaan, terdapat dua program prioritas daerah yang memiliki korelasi sangat kuat dan bersifat saling menguatkan (*mutually reinforcing*) dengan agenda MBG, yaitu Program Prioritas Nomor 18 tentang penciptaan lapangan kerja dan Program Prioritas Nomor 19 tentang kemudahan perizinan berusaha. Titik temu (*nexus*) kebijakan ini menciptakan sebuah ekosistem implementasi yang kokoh, di mana MBG berfungsi sebagai stimulan bagi pencapaian target-target pembangunan daerah.

Hubungan dialektis pertama terlihat pada korelasi antara Program MBG dengan Program Prioritas Kabupaten Pasuruan Nomor 18 yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja Pasuruan. Implementasi MBG melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat di berbagai kecamatan secara *de facto* berfungsi sebagai proyek padat karya yang terstruktur. Berbeda dengan proyek infrastruktur fisik yang bersifat temporer, SPPG menawarkan lapangan kerja yang bersifat permanen-harian selama tahun ajaran berlangsung karena setiap unit dapur membutuhkan struktur manajemen operasional yang kompleks. Kebutuhan tenaga kerja ini mencakup tenaga manajerial, juru masak, asisten dapur, petugas kebersihan, hingga tenaga distribusi logistik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan kebijakan afirmatif bahwa rekrutmen seluruh tenaga kerja operasional tersebut wajib memprioritaskan warga lokal yang berdomisili di radius terdekat dari lokasi dapur. Strategi ini

secara langsung mereduksi angka pengangguran friksional di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas SDM vokasi melalui pelatihan standar higiene sanitasi, sekaligus memastikan perputaran uang (*velocity of money*) tetap beredar di wilayah sekitar untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.

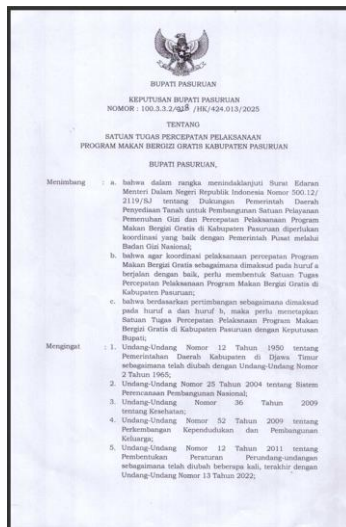
Selanjutnya, hubungan dialektis kedua terjalin melalui sinergi MBG dengan Program Prioritas Kabupaten Pasuruan Nomor 19 yang menekankan pada kemudahan perizinan berusaha dan hubungan industrial yang harmonis. Salah satu tantangan terbesar dalam pelibatan ekonomi rakyat pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah isu legalitas dan standar mutu, mengingat Program MBG mensyaratkan standar keamanan pangan yang ketat seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, persyaratan teknis ini berpotensi menjadi hambatan masuk (*barrier to entry*) yang menggugurkan partisipasi UMKM lokal. Oleh karena itu, Program Prioritas Nomor 19 hadir sebagai solusi pemungkin (*enabler*) di mana pemerintah daerah melakukan strategi jempuit bola untuk memfasilitasi perizinan dan pendampingan sertifikasi bagi pedagang pasar, petani, dan calon pengelola dapur. Langkah ini tidak hanya memastikan inklusivitas rantai pasok agar "kue" anggaran MBG terdistribusi kepada pelaku usaha kecil, tetapi juga mendorong transformasi pelaku usaha mikro dari sektor informal menjadi entitas formal yang terdata dalam ekosistem ekonomi daerah, menciptakan hubungan industrial yang sehat di mana pemerintah bertindak sebagai pembeli siaga (*off-taker*) dan masyarakat sebagai produsen yang terlindungi legalitasnya.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai arsitektur penyelarasan yang utuh, berikut disajikan matriks yang memetakan aliran logika kebijakan (*policy logic flow*) dari visi nasional hingga eksekusi daerah, matriks ini memetakan bagaimana mandat makro (Nasional) diturunkan menjadi operasional mikro (Daerah) melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai poros utamanya:

Tabel 3.3 Matriks Integrasi Asta Cita, Quick Wins, dan Program Prioritas Daerah

Dimensi Strategis	Hulu Kebijakan Nasional (Asta Cita Presiden)	Akselerator Nasional (Quick Wins)	Eksekusi Kebijakan Daerah (33 Prioritas Pasuruan)	Rasionalitas Penyelarasan (Logika Implementasi)
Dimensi 1:	Asta Cita No. 4:	Quick Win No. 1:	Relevansi Umum:	Logika Investasi SDM:
Pembangunan Manusia (<i>Human Capital</i>)	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.	Memberi makanan bergizi gratis di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi balita & ibu hamil.	Mendukung prioritas daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.	Program MBG adalah intervensi fisik (asupan gizi) untuk mencapai target non-fisik (kecerdasan/SDM). Daerah merespons dengan menyediakan infrastruktur layanan (SPPG) agar target nasional tercapai.
Dimensi 2	Asta Cita No. 3:	Implikasi Quick Win 1:	Prioritas No. 18:	Logika Padat Karya:
Ketenagakerjaan (<i>Labor Absorption</i>)	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan industri kreatif.	Pelaksanaan MBG membutuhkan ribuan tenaga operasional (juru masak, logistik, admin) di setiap titik layanan.	Penciptaan lapangan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja Pasuruan.	Unit Pelayanan MBG (SPPG) diposisikan sebagai "Pabrik Gizi" yang menyerap tenaga kerja. Pemkab Pasuruan mengunci regulasi agar rekrutmen pegawai SPPG wajib mengambil warga lokal, sehingga Quick Win Pusat langsung mengurangi pengangguran daerah.
Dimensi 3	Asta Cita No. 6	Quick Win No. 3	Prioritas No. 19	Logika Rantai Pasok Inklusif:
Ekonomi dan Legalitas (<i>Economic Formalization</i>)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.	Mencetak produktivitas lahan pertanian & lumbung pangan (sebagai <i>supplier</i> bahan baku MBG).	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.	Agar petani/UMKM desa bisa menjadi pemasok resmi MBG (sesuai Asta Cita 6), mereka butuh legalitas. Prioritas No. 19 hadir memfasilitasi izin (NIB/SLHS) agar ekonomi informal menjadi formal dan bisa masuk dalam ekosistem anggaran negara.

3.4. Kelembagaan dan Tata Kelola (Satgas)



Gambar 3.1 Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025

Keberhasilan eksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat masif, berisiko tinggi, dan lintas sektoral menuntut adanya wadah kelembagaan yang kuat, terstruktur, serta memiliki legitimasi hukum yang kokoh. Dalam perspektif manajemen strategis pemerintahan, kelembagaan ini berfungsi sebagai tulang punggung operasional yang menjamin keberlanjutan program di tengah dinamika birokrasi. Sebagai langkah konkret dan responsif dalam menerjemahkan arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui penetapan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025 tertanggal 20 Agustus 2025. Pembentukan regulasi ini bukan semata-mata pemenuhan administrasi, melainkan sebuah tindak lanjut imperatif atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, serta Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ terkait dukungan penyediaan tanah untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Legalitas ini memberikan landasan yurisdiksi bagi Satgas untuk memobilisasi sumber daya daerah secara sah dan akuntabel.

A. Struktur Organisasi dan Lini Komando

Arsitektur kelembagaan Satgas MBG Kabupaten Pasuruan didesain dengan pendekatan *Whole-of-Government*, sebuah paradigma yang mengintegrasikan elemen kepemimpinan daerah, aparat penegak hukum, dan perangkat teknis birokrasi ke dalam satu komando terpadu guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati tersebut, struktur organisasi Satgas disusun secara hierarkis yang mencerminkan pembagian kewenangan strategis, taktis, dan operasional.

Pada level tertinggi, struktur organisasi diperkuat oleh Tim Pembina (*Strategic Steering Committee*) yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pelibatan Forkopimda bertujuan untuk menjamin adanya dukungan politik, stabilitas keamanan, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan eksekusi. Tim ini dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sebagai pemegang otoritas tertinggi kebijakan daerah, didukung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang merepresentasikan fungsi legislasi dan penganggaran (budgeting). Elemen krusial lainnya dalam lapisan ini adalah kehadiran unsur Penegak Hukum dan Keamanan, yang meliputi Kepala Kepolisian Resort Pasuruan, Kepala Kepolisian Resort Kota Pasuruan, Komandan Kodim 0819 Pasuruan, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bangil. Kehadiran institusi vertikal ini sangat vital untuk memberikan pendampingan hukum (*legal assistance*) guna mencegah mal-administrasi, serta memberikan jaminan keamanan terhadap aset strategis dan kelancaran distribusi logistik program hingga ke pelosok desa.

Bergerak ke lapisan manajemen eksekutif, dibentuk Tim Pelaksana (*Executing Team*) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Satgas. Penunjukan Sekretaris Daerah sebagai koordinator utama adalah langkah strategis untuk memastikan rentang kendali (*span of control*) birokrasi berjalan efektif, mengingat posisi Sekda sebagai simpul tertinggi administrasi ASN yang mampu menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Satgas dibantu oleh tiga Wakil Ketua yang merepresentasikan pembagian urusan pemerintahan secara komprehensif. Wakil Ketua I dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang fokus mengoordinasikan aspek teknis infrastruktur dan rantai pasok; Wakil Ketua II dijabat oleh Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat yang menangani aspek sosial kemasyarakatan; serta Wakil Ketua III dijabat oleh Asisten Administrasi Umum yang mengawal tata kelola administrasi dan sumber daya manusia. Untuk menunjang operasional harian, sekretariat pusat dikendalikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai Sekretaris I, didampingi oleh Kepala Korwil SPPG Kabupaten Pasuruan sebagai Sekretaris II. Kombinasi kepemimpinan di sekretariat ini menegaskan bahwa fokus gravitasi tata kelola program ini terletak pada ketersediaan bahan pangan (hulu) dan kelancaran operasional unit layanan SPPG (hilir).

Kekuatan operasional Satgas selanjutnya ditopang oleh Keanggotaan Lintas Sektoral yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah strategis. Komposisi ini mencerminkan kompleksitas ekosistem MBG yang multidimensi. Pada klaster perencanaan dan keuangan, dilibatkan Kepala Bappelitbangda dan Kepala BPKPD untuk menjamin akurasi perencanaan anggaran. Pada klaster implementasi teknis dan sosial, peran kunci dipegang oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Sosial untuk memastikan target sasaran siswa terpenuhi dengan standar kesehatan yang layak. Dukungan infrastruktur dan lingkungan dikawal oleh sinergi antara Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas manajemen limbah. Sementara itu, untuk memastikan program ini memberikan dampak ekonomi (*multiplier effect*), dilibatkan klaster pemberdayaan ekonomi yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Ketenagakerjaan. Seluruh struktur ini dilengkapi dengan klaster pendukung yang meliputi Inspektur Daerah sebagai pengawas internal, Dinas Kominfo untuk publikasi, DPMPSTSP untuk kemudahan perizinan, serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan dan Kementerian Agama.

B. Mandat Tata Kelola dan Tugas Pokok

Berdasarkan Diktum KEDUA dalam Keputusan Bupati, Satgas MBG Kabupaten Pasuruan diberikan mandat tata kelola yang spesifik dan terukur untuk menjamin akuntabilitas kinerja. Tugas pokok Satgas ini dikristalisasi

menjadi tiga fungsi pilar utama yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah Koordinasi Strategis, di mana Satgas bertugas melakukan orkestrasi intensif dengan seluruh perangkat daerah dan lintas sektor terkait. Tujuannya adalah menyusun rencana kerja dukungan pelaksanaan Program MBG yang terintegrasi, menghilangkan ego sektoral (*silo mentality*), dan memastikan sinkronisasi sumber daya manusia, anggaran, serta peralatan berjalan tanpa hambatan.

Fungsi kedua adalah Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev). Dalam fungsi ini, Satgas diwajibkan untuk melakukan pengawasan melekat secara berkala terhadap jalannya program di lapangan. Mekanisme monitoring ini didesain sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini, baik berupa kendala distribusi logistik maupun penyimpangan standar mutu pangan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam pelaporan rutin kepada Bupati dan instansi terkait sebagai basis pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*).

Fungsi ketiga adalah Diskresi Taktis, yang memberikan kewenangan kepada Satgas untuk melakukan langkah-langkah strategis lain yang dianggap perlu demi mendukung kelancaran pelaksanaan program. Klausul ini sangat krusial karena memberikan fleksibilitas (*agility*) bagi Satgas untuk mengambil keputusan cepat dalam merespons dinamika lapangan yang tidak terduga atau situasi kahar, sepanjang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga mandat ini menjadi panduan operasional agar program MBG di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Berikut adalah rincian matriks kelembagaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025:

Tabel 3.4 Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
I	Pembina	1. Bupati Pasuruan
		2. Wakil Bupati Pasuruan

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
		3. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
		4. Kepala Kepolisian Resort Pasuruan
		5. Kepala Kepolisian Resort Kota Pasuruan
		6. Kodim 0819 Pasuruan
		7. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
IV	Sekretaris I	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
	Sekretaris II	Kepala Korwil SPPG Kabupaten Pasuruan
V	Anggota	1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan
		2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
		4. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan
		5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
		6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
		7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
		8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan
		9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
		10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
		11. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan
		12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan
		13. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan
		14. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
		15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
		16. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
		17. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
		18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan
		19. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan
		20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
		21. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan
		22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan
		23. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasuruan.

Sumber: Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025

3.5. Infrastruktur Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

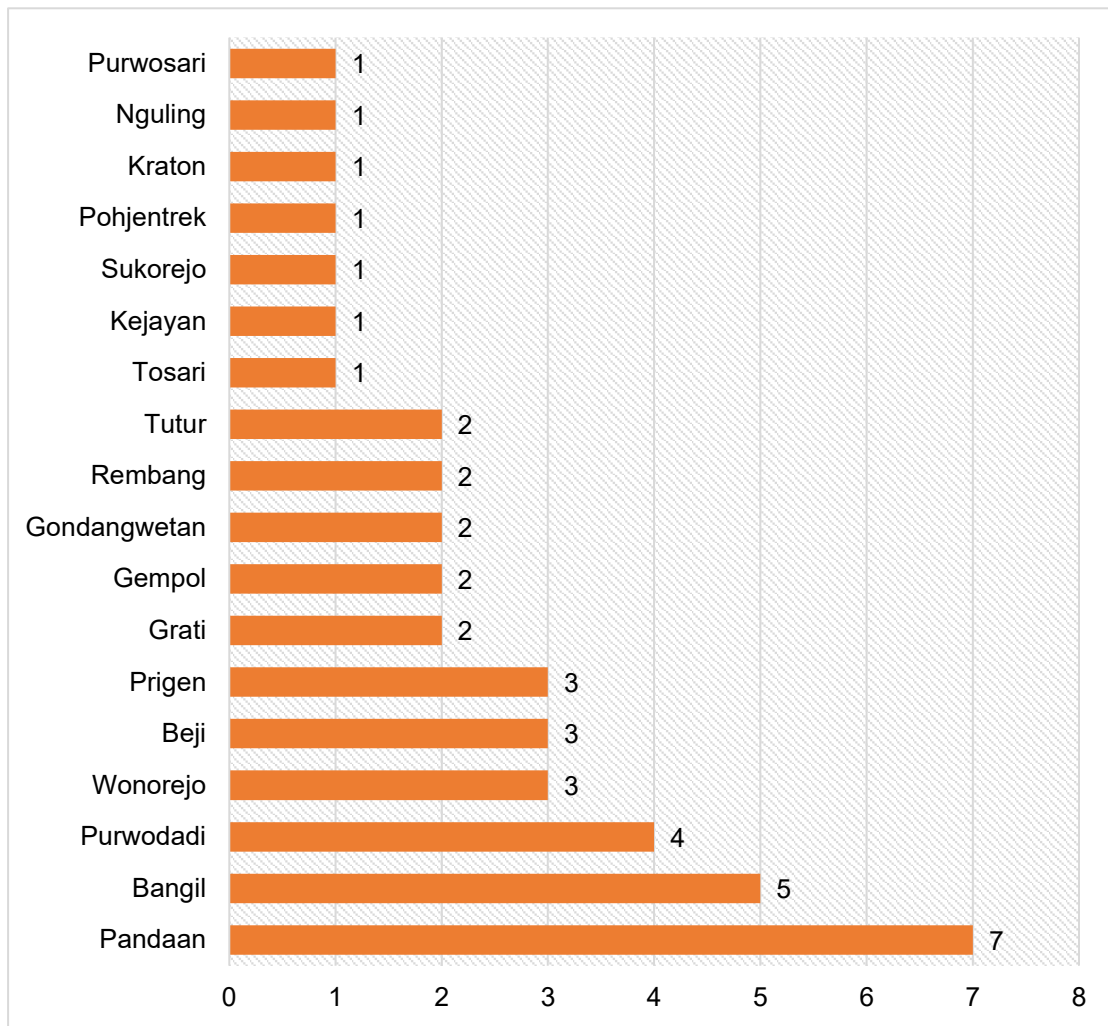
Infrastruktur fisik dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar dimaknai sebagai bangunan dapur, melainkan sebagai simpul-simpul logistik vital yang menjamin kelancaran distribusi nutrisi dari hulu ke hilir. Strategi pengembangan infrastruktur SPPG di Kabupaten Pasuruan menerapkan pendekatan hibrida, yaitu penyelarasan antara direktif strategis Pemerintah Pusat (Top-Down) dengan pemetaan kebutuhan riil berbasis karakteristik kewilayahan (Bottom-Up). Berdasarkan pemetaan komprehensif yang telah difinalisasi, arsitektur layanan MBG di Kabupaten Pasuruan ditopang oleh 42 Unit SPPG yang terdistribusi ke dalam berbagai kluster geografis.

A. Penetapan Lokasi Prioritas Nasional (*Pilot Project*)

Sebagai langkah awal akselerasi (*kick-off*) implementasi program, Pemerintah Pusat melalui instrumen hukum Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2025, telah menetapkan secara imperatif titik-titik lokasi pembangunan tahap pertama. Penetapan ini bertujuan menciptakan standar rujukan (*benchmark*) bagi unit layanan lainnya.

Kabupaten Pasuruan mendapatkan alokasi strategis pada tiga titik koordinat utama, yaitu Kelurahan Gratitunon (Kecamatan Grati), Lapangan Gayam (Kecamatan Gondang Wetan), dan Kelurahan Gempeng (Kecamatan Bangil). Pemilihan ketiga lokasi ini merepresentasikan tiga tipologi wilayah yang berbeda kawasan timur, tengah, dan pusat pemerintahan yang didesain untuk menjadi model percontohan ideal dalam hal tata kelola sanitasi, alur produksi, hingga manajemen limbah dapur. Keberhasilan operasional di tiga titik ini akan menjadi barometer bagi kesiapan 39 titik lainnya yang dibangun melalui skema eskalasi daerah.

Gambar 3.2 Bagan Sebaran Unit SPPG



B. Analisis Geospasial dan Klasterisasi Layanan

Sebagaimana divisualisasikan secara rinci pada Bagan Sebaran Unit SPPG, distribusi 42 unit layanan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang bersifat *asimetris proporsional*. Artinya, alokasi unit dapur tidak dibagi rata secara aritmatika per kecamatan, melainkan dikonsentrasikan berdasarkan densitas populasi siswa (*demand*) dan tingkat kesulitan aksesibilitas (*accessibility constraint*). Berdasarkan analisis geospasial terhadap bagan tersebut, arsitektur layanan MBG di Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi empat klaster strategis utama:

1. Dominasi Layanan pada Aglomerasi (Pandaan Bangil)

Klaster pertama adalah zona aglomerasi perkotaan dan industri yang meliputi Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Bangil. Bagan menunjukkan konsentrasi massa layanan yang sangat signifikan di wilayah ini, di mana Kecamatan Pandaan mendapatkan alokasi 7 (tujuh) unit dan Kecamatan

Bangil mendapatkan 5 (lima) unit. Total 12 unit ini mencakup hampir 28,5% dari keseluruhan infrastruktur dapur di Kabupaten Pasuruan.

Dominasi alokasi ini bukan tanpa alasan. Wilayah Pandaan dan Bangil merupakan episentrum demografi dengan densitas populasi siswa tertinggi serta karakteristik masyarakat urban yang majemuk. Implikasi strategis dari konsentrasi ini adalah perlunya manajemen operasional berstandar industri. Dapur-dapur di kawasan ini didesain dengan kapasitas produksi masal (mass production) yang tinggi dan menuntut manajemen lalu lintas distribusi (traffic management) yang presisi untuk menghindari kemacetan pada jam sibuk pengantaran pagi hari. Selain itu, sebagai kawasan industri, klaster ini memiliki potensi kemitraan CSR (Corporate Social Responsibility) yang paling besar untuk mendukung keberlanjutan program.

2. Strategi Kemandirian di Kawasan Pegunungan (Tosari - Tutar - Prigen)

Klaster kedua mencakup wilayah dataran tinggi dan pegunungan, meliputi Kecamatan Tosari (1 unit), Tutar (2 unit), dan Prigen (3 unit). Meskipun secara kuantitas alokasi unit terlihat minim, namun klaster ini memiliki bobot tantangan operasional (difficulty level) yang paling tinggi.

Analisis terhadap sebaran ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan bukan pada "banyaknya dapur", melainkan pada "ketahanan logistik". Dapur SPPG di wilayah Tosari dan Tutar diproyeksikan beroperasi dengan tingkat kemandirian bahan baku yang tinggi (self-sufficiency). Mengingat topografi yang curam dan risiko akses jalan yang rawan terputus akibat cuaca atau longsor, unit di kawasan ini diintegrasikan langsung dengan sumber bahan pangan lokal (sayur-mayur dataran tinggi dan susu segar). Hal ini memangkas mata rantai logistik dari wilayah bawah, menjamin kesegaran bahan, sekaligus memberdayakan petani hortikultura setempat. Armada distribusi di klaster ini pun membutuhkan spesifikasi khusus (kendaraan gardan ganda atau roda dua) untuk menjangkau sekolah-sekolah di pelosok desa.

3. Pemerataan Akses di Sabuk Pesisir (Coastal Belt)

Klaster ketiga menyasar wilayah pesisir utara dan timur, yang membentang dari Kecamatan Kraton, Rejoso, Lekok, hingga Nguling. Pola sebaran 1-2

unit per kecamatan di zona ini didesain untuk mendekatkan akses layanan ke kantong-kantong kemiskinan ekstrem dan wilayah rawan gizi (stunting locus) yang kerap ditemukan di kawasan nelayan.

Keberadaan unit SPPG di klaster pesisir memiliki peran ganda yang strategis. Selain sebagai penyedia makanan, dapur-dapur ini berfungsi sebagai off-taker (penyerap) komoditas perikanan lokal. Menu makanan di zona ini dapat dioptimalkan berbasis protein ikan laut segar yang melimpah, sehingga menciptakan siklus ekonomi biru (blue economy) di tingkat lokal. Tantangan utama di klaster ini adalah penyediaan air bersih yang memenuhi baku mutu sanitasi, mengingat karakteristik air tanah pesisir yang cenderung payau, sehingga membutuhkan teknologi filtrasi air yang memadai pada instalasi dapur.

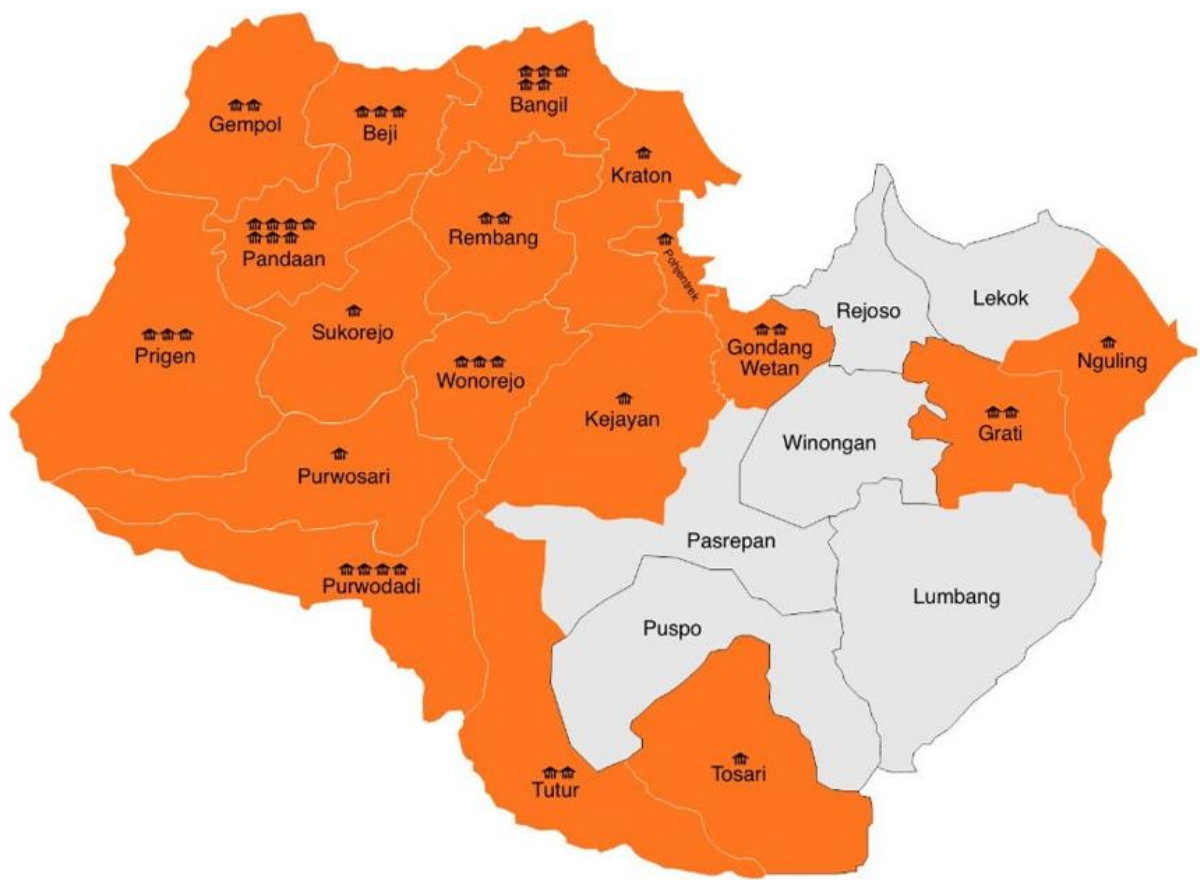
4. Peran Penyangga di Zona Agraris (Buffer Zone)

Klaster keempat adalah wilayah tengah dan selatan seperti Kecamatan Purwodadi (4 unit), Wonorejo (3 unit), dan Sukorejo (1 unit). Wilayah ini bertindak sebagai Buffer Zone atau penyangga logistik. Dengan alokasi unit yang cukup moderat, dapur-dapur di wilayah ini memiliki keuntungan aksesibilitas karena dilalui oleh jalur arteri provinsi (Malang-Surabaya). Peran strategis klaster ini adalah menyeimbangkan beban layanan antar-wilayah. Jika terjadi gangguan operasional di klaster perkotaan atau pegunungan, unit-unit di zona penyangga ini memiliki kapasitas fleksibel untuk memberikan dukungan pasokan darurat (emergency supply), mengingat posisinya yang berada di tengah-tengah struktur kewilayahan Kabupaten Pasuruan.

Secara keseluruhan, visualisasi pada bagan sebaran tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah beranjak dari paradigma "pemerataan aritmatika" menuju paradigma "pemerataan substansial". Setiap titik SPPG ditempatkan melalui kalkulasi matang terhadap risiko bencana, potensi pangan lokal, dan densitas penerima manfaat, demi menjamin bahwa tidak ada satu pun anak di Kabupaten Pasuruan yang tertinggal dalam mendapatkan hak gizi mereka (no one left behind).

Untuk memberikan gambaran visual yang lebih konkret mengenai strategi okupansi wilayah tersebut, berikut disajikan Peta Sebaran Lokasi SPPG Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. Visualisasi spasial ini merepresentasikan integrasi antara basis data kependudukan siswa dengan radius layanan efektif logistik pangan di 18 kecamatan. Melalui peta ini, tergambar jelas konfigurasi "Sabuk Emas" (Golden Belt) Pandaan-Bangil sebagai poros utama layanan, yang disangga oleh jaringan logistik mandiri di wilayah pegunungan dan pesisir, membentuk satu kesatuan ekosistem pemenuhan gizi yang terinterkoneksi.

Gambar 3.3 Peta Sebaran SPPG



3.6. Analisis Detail Kapasitas Layanan dan Kelembagaan Pengelola

Melengkapi visualisasi spasial yang telah dipaparkan sebelumnya, struktur operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan, subbab ini menyajikan uraian deskriptif atas data rinci Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Data disusun sebagai bagian dari upaya pendokumentasian, pemetaan, serta evaluasi awal terhadap

pelaksanaan program pemenuhan gizi yang dikoordinasikan dalam kerangka kerja Tim PPP MBG. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sebaran unit layanan, kelembagaan pengelola, serta jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG.

Secara struktural, data memuat tiga komponen utama, yaitu identitas SPPG berdasarkan lokasi operasional, identitas yayasan pengelola sebagai pelaksana kegiatan, serta jumlah penerima manfaat sebagai indikator capaian layanan. Ketiga komponen ini diposisikan sebagai variabel dasar dalam membaca kapasitas layanan dan jangkauan program pemenuhan gizi di tingkat daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 32 unit SPPG aktif yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Sebaran ini mencakup wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perdesaan, hingga wilayah penyangga dan dataran tinggi. Penamaan SPPG secara konsisten mencerminkan lokasi kecamatan dan desa tempat unit tersebut beroperasi, sehingga memudahkan identifikasi wilayah kerja serta analisis spasial layanan.

Keberadaan lebih dari satu SPPG dalam satu kecamatan tertentu, yang ditandai dengan penomoran unit, menunjukkan adanya kebutuhan layanan yang relatif tinggi pada wilayah tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi kepadatan sasaran penerima manfaat atau keterbatasan kapasitas satu unit layanan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, SPPG dikelola oleh berbagai yayasan dengan latar belakang yang beragam, baik yayasan sosial, pendidikan, keagamaan, maupun yayasan berbasis komunitas. Keragaman ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi, di mana negara dan masyarakat sipil berperan secara sinergis.

Beberapa yayasan tercatat mengelola lebih dari satu unit SPPG, yang mengindikasikan kapasitas manajerial, pengalaman operasional, serta kepercayaan institusional yang relatif baik. Namun demikian, variasi jumlah SPPG yang dikelola oleh masing-masing yayasan juga menegaskan bahwa struktur pengelolaan program masih bersifat plural dan tidak terpusat pada satu entitas tertentu. Kondisi ini penting dicatat sebagai dasar evaluasi tata kelola dan standardisasi layanan ke depan.

Jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Data mencatat jumlah penerima manfaat terendah berada pada 548 orang, sementara jumlah tertinggi mencapai lebih dari 3.600 orang. Mayoritas SPPG melayani penerima manfaat pada rentang 1.500 hingga 3.000 orang, yang dapat dikategorikan sebagai skala layanan menengah.

Variasi jumlah penerima manfaat ini mencerminkan perbedaan kondisi objektif antarwilayah, termasuk kepadatan penduduk, kebutuhan gizi masyarakat, cakupan wilayah layanan, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SPPG. Dengan demikian, angka penerima manfaat tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai ukuran kinerja, melainkan harus dibaca dalam konteks karakteristik wilayah dan kapasitas operasional unit layanan.

Sebagai landasan empiris untuk memvalidasi analisis stratifikasi kapasitas dan peta kolaborasi sosial tersebut, berikut disajikan matriks data terperinci yang menginventarisasi 32 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pasuruan. Tabulasi ini menyajikan secara transparan identitas setiap unit layanan, afiliasi yayasan yang bertindak sebagai operator pelaksana, serta kuota definitif penerima manfaat yang menjadi basis kalkulasi logistik harian, memberikan gambaran utuh mengenai skala operasi yang dikelola di masing-masing titik distribusi.

Tabel 3.5 Rincian SPPG, Nama Yayasan dan Jumlah Penerima Manfaat

No	Nama SPPG	Nama Yayasan	Penerima Manfaat
1	SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang	Yayasan Anak Sekolah Indonesia Makmur	3.645
2	SPPG Pasuruan Grati Kedawung Wetan	Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat	3.122
3	SPPG Pasuruan Wonorejo Wonorejo	Yayasan Ainul Yakin Al Kasitolah	3.043
4	SPPG Pasuruan Tosari Tosari	Yayasan Widya karsa Generasi Emas	3.206
5	SPPG Pasuruan Bangil Kauman	Yayasan Cakra Danta Berdikari	3.112
6	SPPG Gondangwetan Gayam 2	Yayasan Panca Sona Pasuruan	2.353
7	SPPG Pasuruan Gempol Ngerong	Yayasan Maju Jamaah Nyawangan Kras	2.264
8	SPPG Pasuruan Kejayan Pacarkeling	Yayasan Abuya Ali Ihsan Lumajang	3.262
9	SPPG Pasuruan Gondangwetan Gayam	Yayasan Agung Mulia Pasuruan	2.298
10	SPPG Pasuruan Bangil Gempeng	Yayasan Berkah Nusantara Peduli	2.728
11	SPPG Pasuruan Prigen Lumbangrejo	Yayasan Berkah Semesta Nusantara Abadi	2.621
12	SPPG Pasuruan Pandaan Nogosari	Yayasan Harapan Mulia Sejahtera	2.773
13	SPPG Kalianyar Bangil	Yayasan Rumah Sahabat Group Nusantara	2.449
14	SPPG Kebonwaris	Yayasan Harapan Mulia Sejahtera	2.026
15	SPPG Pasuruan Purwodadi Gajahrejo	Yayasan Cinta Suroya Abadi	2.539
16	SPPG Pasuruan Rembang Kanigoro	Yayasan Bina Mulia Rembang	2.312
17	SPPG Kenduruan Sukorejo	Yayasan Darul Falah Nur Hidayah	2.048
18	SPPG Pasuruan Pohjentrek Warungdowo	Yayasan Pendidikan Anak Islam Khoirur Rohman	1.684

No	Nama SPPG	Nama Yayasan	Penerima Manfaat
19	SPPG Pasuruan Wonorejo Wonorejo 2	Yayasan Kemala Bhayangkari	2.664
20	SPPG Pasuruan Rembang Rembang	Yayasan Kemala Bhayangkari	2.967
21	SPPG Pasuruan Beji Gajahbendo	Yayasan Inti Gizi Nasional	2.153
22	SPPG Pasuruan Wonorejo Lebak Sari	Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini	2.475
23	SPPG Pasuruan Tutar Tlogosari	Yayasan Lembaga Islam Bumi Aswaja	1.118
24	SPPG Pasuruan Nguling Watestani	Yayasan Bahari Buana Darmawan	1.814
25	SPPG Pasuruan Kraton Sidogiri	Yayasan Majelis Taklim Imadul Bilad	1.604
26	SPPG Pasuruan Pandaan Jogosari	Yayasan Manggala Kinasih Rahayu	1.262
27	SPPG Pasuruan Gempol Kejapanan	Karya Purna Yudha	2.137
28	SPPG Pasuruan Beji Gunung Gangsir	Yayasan Hidayatul Muta'alimin Sidoarjo	548
29	SPPG Pasuruan Pandaan Kutorejo	Banyu Urip Sejahtera Enam	1.493
30	SPPG Wonokoyo Beji	Yayasan Karya Anak Desa	1.051
31	SPPG Tawangrejo Pandaan	Yayasan Cendekia Medika Nusantara	1.073
32	SPPG Pasuruan Purwodadi Gajahrejo 2	Yayasan Generasi Putra Bangsa Nasional	1.046
TOTAL			70.890

3.7. Standarisasi Higiene dan Sanitasi (SLHS)



Gambar 3.4 Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 500.16.7.2/1090/HK/424.013/2025

Keamanan pangan (*food safety*) merupakan pilar fundamental yang tidak dapat ditawar dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mengingat skala program yang masif dan dampaknya yang langsung terhadap kesehatan ribuan siswa, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan standar ketat bahwa setiap unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi legalitas berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Untuk menjamin kepatuhan ini berjalan beriringan dengan kecepatan target operasional, Pemerintah Daerah melakukan terobosan hukum melalui penerbitan regulasi khusus percepatan perizinan.

Sebagai landasan yuridis operasional, Bupati Pasuruan telah menerbitkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 500.16.7.2/1090/HK/424.013/2025 tentang Pejabat Penandatanganan Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Dalam Program Makan Bergizi Gratis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Regulasi yang mulai berlaku efektif pada tanggal 20 November 2025 ini bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan sebuah instrumen kebijakan strategis (*strategic policy instrument*) yang dirancang untuk memangkas jalur birokrasi konvensional.

Urgensi penerbitan keputusan ini tertuang secara eksplisit dalam konsiderans "Menimbang" huruf b, yang menyatakan perlunya langkah taktis untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa jika menggunakan mekanisme reguler yang kaku, risiko keterlambatan operasional dapur akan sangat tinggi. Oleh karena itu, regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus kecepatan layanan (*speed of service*).

Salah satu poin paling krusial dalam keputusan ini adalah adanya pergeseran kewenangan yang signifikan. Berdasarkan Diktum KEEMPAT, keputusan ini secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati sebelumnya (Nomor 500.16.7.2/1020/HK/424.013/2025) yang semula menempatkan kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kewenangan tersebut kini dialihkan sepenuhnya kepada Pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan. Langkah ini merupakan bentuk reformasi birokrasi yang cerdas. Dengan mengembalikan otoritas validasi ke Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* teknis, proses penilaian kelayakan tidak lagi tersandera oleh rantai administrasi perizinan umum, melainkan langsung ditangani oleh ahli kesehatan masyarakat yang kompeten. Ini menjamin bahwa aspek kecepatan tidak mengorbankan aspek kualitas medis dan sanitasi.

Dalam Diktum KEDUA, mandat yang diberikan kepada Pejabat Penandatanganan dirumuskan secara rinci dan komprehensif, mencakup tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara simultan:

1. Fungsi Verifikasi Faktual (Diktum Kedua huruf a): Pejabat yang ditunjuk berwenang memverifikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh SPPG secara manual. Klausul "manual" ini penting sebagai back-up plan untuk mengantisipasi kendala pada sistem perizinan digital nasional (OSS), memastikan bahwa kendala IT tidak boleh menghambat proses legalisasi dapur. Verifikasi ini menjadi gerbang utama untuk menyaring kelayakan fisik bangunan, peralatan, dan penjamah makanan.
2. Fungsi Legalisasi Hibrida (Diktum Kedua huruf b): Regulasi ini menerapkan pendekatan modern dengan memberikan wewenang penandatanganan sertifikat baik secara manual maupun elektronik. Fleksibilitas ini (sistem hibrida) didesain untuk kecepatan; sertifikat dapat diterbitkan seketika (real-time) secara elektronik untuk SPPG yang jauh, atau ditandatangani basah

untuk keperluan administratif tertentu, tanpa harus menunggu birokrasi meja ke meja.

3. Fungsi Akuntabilitas (Diktum Kedua huruf c): Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, pejabat tersebut wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara langsung kepada Bupati. Mekanisme pelaporan langsung ini memotong rantai komando yang panjang, memungkinkan Kepala Daerah untuk memantau progres kesiapan sanitasi dapur secara real-time dan mengambil keputusan intervensi jika ditemukan kendala.

Dengan berlakunya SK ini sejak 20 November 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah meletakkan fondasi regulasi yang kokoh. Kebijakan ini memastikan bahwa seluruh 32 unit SPPG yang beroperasi nantinya tidak hanya legal secara administrasi, tetapi benar-benar telah lolos uji kelayakan kesehatan melalui mekanisme verifikasi jalur cepat (*fast-track verification*) yang akuntabel.

BAB IV

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan peta jalan (*roadmap*) kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan tidak akan lengkap tanpa adanya kejujuran intelektual untuk membedah realitas tantangan yang dihadapi di lapangan. Setelah pada bab-bab sebelumnya dibahas mengenai arsitektur ideal mulai dari penyelarasan visi Asta Cita, orkestrasi kelembagaan Satgas, hingga strategi infrastruktur terpusat maka bab ini berfungsi sebagai penyeimbang (*counterweight*) yang memotret sisi kompleksitas operasional.

Mengingat skala program ini yang bersifat masif, mencakup puluhan ribu penerima manfaat yang tersebar di wilayah dengan variabilitas geografis ekstrem, potensi friksi antara perencanaan (*das sollen*) dan pelaksanaan (*das sein*) adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Terintegrasi (*Integrated Risk Management*) untuk mengidentifikasi simpul-simpul kendala strategis, operasional, hingga finansial, guna merumuskan langkah mitigasi yang presisi.

Selanjutnya, sebagai bentuk kepatuhan tegak lurus terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel, seluruh rencana tindak lanjut atas kendala tersebut diletakkan dalam kerangka harmonisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat. Hal ini menegaskan posisi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai operator daerah yang disiplin, adaptif, namun tetap berpegang teguh pada komando regulator nasional.

4.1. Identifikasi Kendala dan Permasalahan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap ekosistem eksisting, mulai dari rantai pasok pangan, kondisi infrastruktur fisik wilayah, hingga kesiapan budaya kerja sumber daya manusia, teridentifikasi tiga klaster permasalahan utama yang memiliki bobot risiko tinggi (*high-risk impact*). Ketiga klaster ini bukanlah persoalan parsial, melainkan tantangan sistemik yang saling berkorelasi.

1. Kendala Konektivitas Geografis dan Tantangan Distribusi Akhir (*The Last Mile Delivery Problem*). Kabupaten Pasuruan dianugerahi bentang alam yang unik namun menantang bagi operasi logistik pangan skala industri. Penerapan

strategi "Sentralisasi Produksi" di mana satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pusat melayani ribuan siswa di berbagai titik sekolah satelit menghadapi ujian berat pada aspek distribusi.

- a. Disparitas Topografi Wilayah: Wilayah kerja layanan terbelah menjadi dua karakteristik ekstrem: dataran rendah pesisir yang rawan banjir rob dan kepadatan lalu lintas industri, serta dataran tinggi pegunungan (seperti Kecamatan Tosari, Tuter, Prigen, dan Puspo) yang memiliki kontur jalan menanjak curam serta rawan longsor. Tantangan ini bukan sekadar masalah transportasi, melainkan masalah Stabilitas Mutu Pangan. Makanan siap santap memiliki "jendela waktu kritis" (*critical time window*) biasanya kurang dari 4 jam sebelum bakteri mulai berkembang biak atau tekstur makanan rusak. Distribusi ke sekolah-sekolah terpencil di lereng Gunung Bromo, misalnya, menuntut armada logistik yang tidak hanya tangguh secara mekanis, tetapi juga dilengkapi teknologi *thermal storage* (penahan suhu) yang mumpuni. Risiko keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk (kabut tebal/hujan) atau kemacetan di jalur arteri dapat berakibat fatal: makanan sampai ke siswa dalam kondisi dingin, tidak layak konsumsi, atau bahkan basi. Ini adalah risiko "Zero Tolerance" yang harus diantisipasi.
 - b. Aksesibilitas Titik Serah: Tidak semua satuan pendidikan (sekolah penerima manfaat) terletak di pinggir jalan raya utama yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Banyak sekolah sasaran berada di dalam gang sempit atau wilayah pelosok yang hanya bisa diakses kendaraan roda dua. Kondisi ini menuntut skema distribusi *multimoda* (misalnya: truk besar dari dapur ke titik kumpul, dilanjutkan motor ke sekolah), yang tentu saja menambah kompleksitas manajemen waktu dan biaya operasional.
2. Risiko Volatilitas Rantai Pasok dan Ketersediaan Bahan Baku (*Supply Chain Volatility*). Program MBG didesain untuk menyerap komoditas lokal demi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Namun, realitas pasar komoditas pertanian dan peternakan seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan industri yang menuntut "Kepastian Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas" (3K).
- a. Elastisitas Suplai yang Terbatas: Ketika permintaan bahan pangan (telur, daging ayam, susu, sayur mayur) melonjak secara tiba-tiba dan

konstan setiap hari akibat program ini, ada risiko sisi penawaran (*supply side*) dari petani/peternak lokal Kabupaten Pasuruan mengalami guncangan (*shock*). Tidak semua komoditas tersedia sepanjang tahun (faktor musiman). Kekhawatiran utamanya adalah jika SPPG dipaksa menyerap produk lokal namun stok sedang kosong, yang akhirnya memaksa dapur mengambil bahan dari luar daerah atau menurunkan standar spesifikasi bahan baku.

- b. Inflasi dan Tekanan Biaya Satuan (*Unit Cost Pressure*): Harga bahan pokok bersifat fluktuatif. Lonjakan harga cabai, telur, atau beras yang sering terjadi menjelang hari besar keagamaan atau akibat gagal panen, akan berdampak langsung pada struktur biaya per porsi (*Cost of Goods Sold*). Mengingat anggaran per porsi dari pemerintah bersifat tetap (*fixed cost*), kenaikan harga bahan baku ini menciptakan dilema bagi operator dapur: apakah mereka harus menanggung rugi, atau mengurangi gramasi/porsi makanan siswa? Tanpa mekanisme penyesuaian harga indeks (*price adjustment mechanism*), ini adalah risiko finansial terbesar bagi keberlangsungan operasional mitra penyedia.
 - c. Manajemen Limbah Masif (*Massive Waste Management*): Produksi puluhan ribu porsi makanan setiap hari akan menghasilkan produk sampingan berupa sampah organik (sisa makanan) dan anorganik (kemasan distribusi) dalam volume tonase yang luar biasa. Jika tidak dikelola dengan sistem sirkular, hal ini akan menciptakan krisis lingkungan baru di sekitar lokasi dapur dan sekolah.
3. Kesenjangan Kompetensi SDM dan Transformasi Budaya Kerja (*Culture Shock*). Transisi dari model "Kantin Sekolah Tradisional" menuju "Manufaktur Gizi Terstandar" adalah sebuah lompatan budaya yang radikal.
- a. Kedisiplinan Standar Sanitasi Industri: Tenaga kerja yang direkrut oleh Yayasan/Koperasi pelaksana sebagian besar adalah masyarakat lokal yang mungkin belum terbiasa dengan protokol *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang ketat. Menggunakan masker, sarung tangan, penutup kepala, dan menjaga sterilitas selama 6-8 jam kerja bukanlah kebiasaan yang mudah dibentuk instan. Risiko *human error* seperti lupa

mencuci tangan, kontaminasi silang antara bahan mentah dan matang, atau kelalaian pengecekan suhu masih sangat tinggi.

- b. Beban Administratif Pelaporan: Selain memasak, operator juga dituntut melakukan pelaporan administrasi yang akuntabel (jumlah porsi, foto kegiatan, stok opname) secara digital. Kesenjangan literasi digital di kalangan tenaga operasional dapur dapat menghambat aliran data pelaporan ke Satgas Kabupaten maupun Pusat.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Menyadari kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengambil sikap strategis yang bijaksana, hati-hati, dan taat asas. Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun tidak dimaksudkan untuk mendahului kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan untuk mempersiapkan landasan pendaratan (*landing pad*) yang mulus bagi regulasi nasional.

Prinsip utama RTL Kabupaten Pasuruan adalah: "Siap Secara Infrastruktur, Menunggu Secara Prosedur."

Berikut adalah penjabaran rinci langkah tindak lanjut yang diselaraskan dengan direktif Badan Gizi Nasional:

1. Penantian dan Adopsi Penuh Terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) Operasional. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memutuskan untuk menahan diri dari pembuatan aturan teknis parsial yang berpotensi bertentangan di kemudian hari. Fokus daerah saat ini adalah menunggu terbitnya "Kitab Suci" regulasi teknis dari Badan Gizi Nasional, khususnya terkait:
 - a. Standar Harga Satuan (SHS): Menunggu ketetapan nilai rupiah per porsi yang telah memperhitungkan variabel inflasi daerah dan koefisien kemahalan distribusi geografis (khususnya untuk wilayah Tosari/pegunungan). Daerah tidak akan menetapkan harga sepihak demi menghindari temuan audit BPK/BPKP.
 - b. Standar Menu Siklus Nasional: Menunggu pedoman komposisi makro-mikro nutrien yang baku. Daerah siap melakukan modifikasi menu berbasis kearifan lokal (substitusi bahan) hanya jika diperbolehkan secara eksplisit dalam Juknis tersebut.

2. Integrasi Total ke dalam Ekosistem Digital Nasional. Guna menjawab tantangan monitoring dan validasi data penerima manfaat:
 - a. Satgas Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan tidak akan membangun aplikasi pemantauan tandingan yang memboroskan anggaran daerah.
 - b. Langkah konkretnya adalah mempersiapkan database siswa (by Name by Address) yang bersih dan valid, yang sewaktu-waktu siap diinjeksikan (*data injection*) ke dalam *Super-App* atau Dashboard Monitoring yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional. Kesiapan ini menjamin interoperabilitas data saat program dimulai.
3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Berbasis Kurikulum Pusat. Untuk memitigasi risiko inkompetensi tenaga penjamah makanan:
 - a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan akan bertindak sebagai fasilitator pelatihan. Namun, materi, modul, dan standar sertifikasi kompetensi yang diajarkan akan sepenuhnya mengacu pada kurikulum resmi yang dirilis oleh Badan Gizi Nasional.
 - b. Rencana tindak lanjutnya mencakup pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) segera setelah modul pelatihan pusat diterima, memastikan seluruh juru masak di 32 titik SPPG memiliki persepsi standar higiene yang seragam dengan standar nasional.
4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Akuntabel. Terkait model kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (Yayasan/Swasta/Koperasi):
 - a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Pasuruan akan mengadopsi model dokumen kontrak (*contract template*) yang disiapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) khusus untuk program MBG. Hal ini krusial untuk memitigasi risiko hukum perdata maupun pidana korupsi di masa depan.
 - b. Satgas Daerah akan memastikan bahwa klausul-klausul dalam kontrak tersebut melindungi kepentingan daerah, termasuk sanksi tegas bagi penyedia yang gagal memenuhi standar distribusi tepat waktu (*On-Time Delivery*).

5. Penguatan Jaring Pengaman Pengawasan (Quality Assurance). Meskipun menunggu arahan pusat, fungsi pengawasan daerah akan dioptimalkan melalui peran Inspektorat Daerah dan Dinas Kesehatan:
 - a. Mempersiapkan tim "Gugus Tugas Mutu" yang akan melakukan uji petik (*random sampling*) keamanan pangan secara berkala segera setelah dapur beroperasi.
 - b. Hasil uji laboratorium daerah akan dilaporkan secara berjenjang ke Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi performa mitra penyedia.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Kajian Kesiapan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan ini disusun sebagai manifestasi komitmen daerah dalam menerjemahkan visi besar nasional ke dalam tapak eksekusi lokal yang terukur. Setelah melalui serangkaian analisis mendalam mulai dari penyelarasan filosofis Asta Cita, bedah regulasi kelembagaan, pemetaan infrastruktur layanan, hingga identifikasi risiko lapangan maka pada bab penutup ini ditarik intisari kesimpulan strategis dan rumusan rekomendasi kebijakan.

Bab ini menegaskan bahwa bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Program MBG bukan sekadar aktivitas distribusi pangan semata, melainkan sebuah intervensi negara yang fundamental dalam mencetak modal manusia (*human capital*) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

5.1. Kesimpulan

1. **Koherensi Visi dan Legitimasi Kelembagaan yang Kokoh** Kabupaten Pasuruan telah berhasil meletakkan fondasi regulasi yang kuat mendahului daerah lain. Terbitnya Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/918/HK/424.013/2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program MBG membuktikan bahwa daerah ini telah meninggalkan pendekatan sektoral yang kaku. Struktur Satgas yang melibatkan unsur Forkopimda (TNI/Polri/Kejaksaan) dan lintas Perangkat Daerah menunjukkan penerapan prinsip *Whole-of-Government Approach*. Dengan struktur ini, hambatan birokrasi dapat dipangkas (de-birokratisasi) melalui satu komando yang terintegrasi di bawah Sekretaris Daerah.
2. **Terobosan Regulasi dalam Penjaminan Mutu (Regulatory Sandbox)** Pemerintah Daerah menunjukkan agilitas birokrasi melalui penerbitan Keputusan Bupati Nomor 500.16.7.2/1090/HK/424.013/2025 terkait percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan diskresi yang mengalihkan kewenangan validasi dari dinas perizinan umum ke dinas teknis (Kesehatan) serta pemberlakuan mekanisme tanda tangan elektronik/hibrida,

merupakan inovasi krusial. Hal ini menjamin bahwa kecepatan operasional 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan mengorbankan aspek keamanan pangan (*food safety*) yang menjadi nyawa program ini.

3. **Strategi Infrastruktur Berbasis Efisiensi (Economies of Scale)** Pilihan strategi untuk menerapkan model "Sentralisasi Dapur" (Satu SPPG melayani kluster sekolah dalam radius tertentu) dinilai sebagai langkah paling rasional dibandingkan model desentralisasi (dapur di setiap sekolah). Meskipun memiliki tantangan distribusi, model ini memungkinkan pengawasan mutu yang lebih ketat, standarisasi rasa yang seragam, dan efisiensi biaya produksi (*cost-efficiency*). Kesiapan fisik bangunan dan peralatan yang telah dipetakan menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan siap "tancap gas" begitu logistik bahan baku tersedia.
4. **Realisme dalam Mitigasi Risiko** Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak menutup mata terhadap kompleksitas lapangan. Identifikasi terhadap tiga kendala utama yakni tantangan topografi "Last Mile Delivery" di wilayah pegunungan, volatilitas rantai pasok bahan baku lokal, dan kesenjangan budaya sanitasi SDM menunjukkan kematangan perencanaan. Keputusan untuk menyelaraskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sepenuhnya pada Juknis Badan Gizi Nasional adalah langkah *prudent* (kehati-hatian) untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari benturan regulasi.

5.2. Rekomendasi

Guna menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dan optimalisasi dampak program di masa depan, direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Rekomendasi Jangka Pendek (Pra-Operasional & 100 Hari Pertama)
 - a. Institusionalisasi "Crisis Center" Satgas MBG: Satgas yang telah dibentuk tidak boleh hanya menjadi struktur di atas kertas. Direkomendasikan pembentukan Sekretariat Tetap atau Command Center fisik yang beroperasi 24/7 pada fase awal implementasi. Fungsi utamanya adalah memantau pergerakan distribusi logistik secara real-time dan merespons insiden (misal: armada mogok atau dugaan keracunan) dalam hitungan jam (golden hour response).

- b. Simulasi Rantai Pasok (Dry Run/Stress Test): Sebelum peluncuran resmi, perlu dilakukan simulasi distribusi skala penuh ("Gladi Resik") ke wilayah dengan topografi tersulit (seperti Tosari atau Prigen). Uji coba ini penting untuk mengukur ketahanan suhu makanan dan ketepatan waktu tempuh armada, sehingga koreksi teknis dapat dilakukan sebelum program berjalan efektif.
 - c. Kampanye Masif Edukasi Gizi: Keberhasilan program tidak hanya diukur dari makanan yang sampai, tapi makanan yang dihabiskan (zero plate waste). Perlu ada gerakan edukasi gizi di sekolah-sekolah agar siswa memahami pentingnya menu yang disajikan, guna menekan angka sisa makanan yang terbuang.
 2. Rekomendasi Jangka Menengah (Penguatan Ekosistem Ekonomi)
 - a. Lokalisasi Rantai Pasok (Local Content Requirement): Pemerintah Daerah harus mendorong terciptanya ekosistem "Pertanian Kontrak" (Contract Farming) antara SPPG dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan peternak lokal Pasuruan. Direkomendasikan agar Satgas memfasilitasi perjanjian kerjasama yang mengikat, di mana petani mendapatkan kepastian pembeli (off-taker), dan dapur mendapatkan kepastian pasokan. Ini akan menciptakan multiplier effect ekonomi yang nyata bagi warga Pasuruan.
 - b. Digitalisasi Pengawasan Partisipatif: Mengembangkan atau mengadopsi kanal pengaduan berbasis digital (QR Code di setiap kotak makan atau sekolah) yang terhubung langsung ke Satgas. Hal ini memungkinkan siswa, orang tua, dan guru menjadi "pengawas eksternal" yang memberikan umpan balik langsung terkait rasa, kebersihan, dan ketepatan waktu.
 3. Rekomendasi Jangka Panjang (Keberlanjutan & Inovasi)
 - a. Transformasi Menuju "Green Kitchen": Mendorong transisi energi dan manajemen limbah pada unit-unit SPPG. Rekomendasi mencakup penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, pelarangan plastik sekali pakai dalam distribusi, serta pengolahan limbah organik menjadi kompos atau pakan ternak (maggot) bekerjasama dengan Dinas

Lingkungan Hidup. Program MBG harus menjadi contoh praktik ekonomi sirkular.

- b. Integrasi Data Kesehatan Siswa (Nutri-Track): Data asupan makanan dari program ini harus disandingkan dengan data antropometri (tinggi/berat badan) siswa secara berkala. Dinas Kesehatan direkomendasikan untuk melakukan analisis longitudinal: apakah intervensi makanan gratis ini berkorelasi positif terhadap penurunan angka stunting dan kenaikan konsentrasi belajar siswa dalam jangka waktu 1-3 tahun.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.